

**Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional
Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan**

(Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Andarta Oktavian
105030104111009**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

Motto

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

“My favorite place
In all the world
Is next to you”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor
Perdagangan (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)

Disusun oleh : Andarta Oktavian

NIM : 105030104111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 30 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 24 Juli 2014
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Andarta Oktavian
 Judul : Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan. (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)

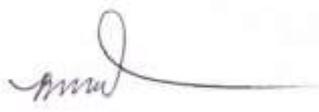
dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

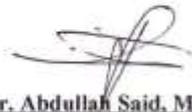
Anggota

 **Drs. Heru Ribawanto, MS**
 NIP. 19590911 197903 1 002


Drs. Minto Hadi, M.Si
 NIP. 19540127 198103 003

Ketua

Anggota


Dr. Abdullah Said, MSi
 NIP. 19570911 198503 1 003


Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP
 NIP. 19531113 198212 1 001



Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 8 Juli 2014



Andarta Oktavian

RINGKASAN

Andarta Oktavian, 2014, **Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)**, (1) Drs. Heru Ribawanto,MS, (2) Drs. Minto Hadi,M.Si, 124 Hal.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang nyata dalam mengurus segala aspek secara mandiri baik dalam sistem pembangunan, pemerintahan, dan aspek finansial daerah. Akan tetapi dalam masalah aspek finansial, pemerintah daerah masih banyak bergantung dengan adanya dana perimbangan dari pusat. Permasalahan ini terjadi karena masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah melalui sektor perdagangan dimana pasar tradisional sebagai salah satu pusat perdagangan di Sidoarjo. Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini mempunyai tugas dan kedudukan mengenai permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung pembangunan daerah, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman dengan tiga alur analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai instansi yang berwenang untuk mengurus dan mengelola pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa cara seperti meningkatkan ketrampilan dan kemampuan aparat, penyesuaian tarif, meningkatkan kapasitas stan, memperbaiki prasarana dan sarana yang ada serta mengoptimalkan potensi pasar tradisional yang ada. Diharapkan kedepannya dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Pendapatan Asli Daerah, Pasar tradisional

SUMMARY

Andarta Oktavian, 2014, **The Capacity Building of Traditional Markets as Regional Revenue Boost in Trade Sector (Study in the Department of Market Sidoarjo)**, (1) Drs. Heru Ribawanto,MS, (2) Drs. Minto Hadi,M.Si, 124 Hal.

According to Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, the local government has real authority in managing all aspects of the system independently both in the development, administration, and financial aspects of the area. However, the financial aspects of the problem, many local governments still rely with the balance of funds from the center. This problem occurs because of the low local revenue (LR) that can be taken by the local government. Therefore Sidoarjo regency seeks to increase revenue through trade areas where traditional market as one of the trade center in Sidoarjo. Office Market in Sidoarjo district in this case has the duty and the position on the problems in the management of traditional markets in Sidoarjo. Thus, in addressing these issues need to figure out how efforts to increase local revenue (LR) in order to support regional development, as well as find out the factors supporting and inhibiting factors in the increase in revenue (LR).

This study used a descriptive research with a qualitative approach that aims to determine the capacity of traditional markets as an effort to increase revenue (LR) in trade in Sidoarjo. This study analyzes using Miles and Huberman with three flow analysis data reduction, data display and conclusion.

The results showed that in performing their duties as authorized agency for administering and managing traditional markets as an effort to increase revenue (LR), Office of Market district of Sidoarjo have several ways such as improving skills and capacity, tariff adjustments, increase the capacity of the booth, repair infrastructure and existing facilities as well as to optimize the potential of the existing traditional markets. It is expected that the future can help increase revenue (LR) Sidoarjo.

Keywords: The Capacity Building, Regional Revenue, Traditional Market

Persembahkan

Dengan segenap syukur alhamdulillah dan rasa terima kasih yang sangat besar, saya persembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, kuasa dan segala Ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan lancar dan tepat waktu.
- ❖ Papa dan Mama, terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran yang tiada hentinya yang diberikan kepada saya dan segalanya dukungan dan nasehat yang telah diberikan sehingga dapat memotivasi saya. Kalian memang orang tua yang terhebat.
- ❖ Riska Nindyasari dan Choirudin Zuhri serta Abid Pranaja, Kakak-kakak saya serta ponakan yang lucu, terima kasih atas doa dan perhatiannya selama ini.
- ❖ Arnsed Purbosari My Little Angel, terima kasih dukungan dan dorongan yang diberikan kepada saya serta kesabaran yang tiada habisnya dalam menghadapi saya. Semua ini berkat kamu sehingga saya selalu ini menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai. Semoga kita dapat mewujudkan impian-impian kita. Love you!!!
- ❖ Tommi, Adit, Zuki, Risandi, Rizky, Anun, Intan, Arsyi, Dimas, Om Arif, Akbar, Iqbal, Finsa, Lemu terima kasih atas dukungan, semangat dan doa yang diberikan kepada saya serta selalu ada buat saya. Kalian memang hebat.
- ❖ Teman-teman Sevensoul, WTP dan Mafioso terima kasih atas semangat, dorongan dan doanya yang diberikan kepada saya.
- ❖ Bapak Imam, Bapak Heru, Bapak Minto dosen pembimbing saya. Terima kasih atas arahan, nasehat dan bimbingan selama ini yang telah diberikan kepada saya.
- ❖ Dinas Pasar dan Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang telah banyak membantu dalam penelitian ini hingga selesai.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik yang banyak memberikan ilmu hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan dan pertemanan selama ini. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan nasehat, kritik dan saran agar skripsi ini lebih sempurna.
6. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si dan Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP selaku Dosen Penguji.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sudarmadji dan Ibu Tatik Dwi Utami, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya dengan segenap kasih dan sayang serta kesabarannya demi mempelancar proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hendi Listianingsih, M.Si selaku Ketua Bidang Pengembangan dan Penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

9. Seluruh Pegawai Dinas Pasar yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyelesaian skripsi ini, Arnesd Purbosari.
11. Seluruh teman-teman jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2010, khususnya sahabat-sahabat terbaikku, Zuki Maulana, Risandi Satyo Nirmolo, Ainidyra Padmasari dan Intania Dwi Permata yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hingga terselesainya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, Agustus 2014
Peneliti

Andarta Oktavian

DAFTAR ISI

	Hal.
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
1. Kontribusi Akademis	10
2. Kontribusi Praktis	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Administrasi Secara Umum	13
1. Pengertian Administrasi	13
2. Ruang Lingkup Administrasi	15
3. Administrasi Pembangunan	16
B. Tinjauan Pemerintah Daerah Secara Umum	18
1. Pengertian Pemerintah Daerah	18
2. Konsep Otonomi Daerah	19
3. Prinsip Dasar Otonomi Daerah	20
4. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	20
5. Faktor-Faktor Pelaksanaan Otonomi Daerah	22
C. Pengembangan Kapasitas	24
1. Pengertian Pengembangan	24
2. Konsep Pengembangan Kapasitas	25
3. Komponen Penetapan Strategi Pengembangan Kapasitas	26
4. Tingkatan Dalam Strategi	28
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	31
2. Pengertian Pajak Daerah	32



3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	34
4. Sumber-Sumber Penerimaan Keuangan Daerah	35
5. Upaya Meningkatkan PAD	38
E. Konsep Pasar	39
1. Pengertian Pasar	39
2. Jenis Pasar	41
3. Fungsi dan Peran Pasar	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Sumber Data dan Jenis Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	54
G. Metode Analisis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Situs Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	58
2. Kondisi Perekonomian Sidoarjo	60
3. Pemerintahan Sidoarjo	62
B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	64
1. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo	64
2. Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.....	65
3. Struktur Organisasi	65
4. Tugas Pokok dan Fungsi	67
5. Tugas-Tugas Bidang	69
C. Penyajian Data Penelitian.....	79
1. Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perdagangan	79
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	80
b. Meningkatkan Pendapatan Pasar	82
c. Meningkatkan Kapasitas Stan	87
d. Fasilitas Penunjang	89
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Strategi Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	90
a. Faktor Pendukung	90
1) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.	90
2) Mengoptimalkan Potensi Pasar yang Ada	92
b. Faktor Penghambat.....	93

1) Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar pajak retribusi.....	93
2) Kurangnya Pemahaman pedagang dalam menjaga fasilitas yang ada di dalam pasar.....	94
D. Analisis Data	95
1. Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perdagangan	95
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	95
b. Meningkatkan Pendapatan Pasar	97
c. Meningkatkan Kapasitas Stan.....	99
d. Fasilitas Penunjang	101
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Strategi Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	102
a. Faktor Pendukung	102
1) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	102
2) Mengoptimalkan Potensi Pasar yang Ada	103
b. Faktor Penghambat.....	104
1) Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar pajak retribusi.....	104
2) Kurangnya Pemahaman pedagang dalam menjaga fasilitas yang ada di dalam pasar.....	105
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
Daftar Pustaka.....	111
Lampiran	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 83

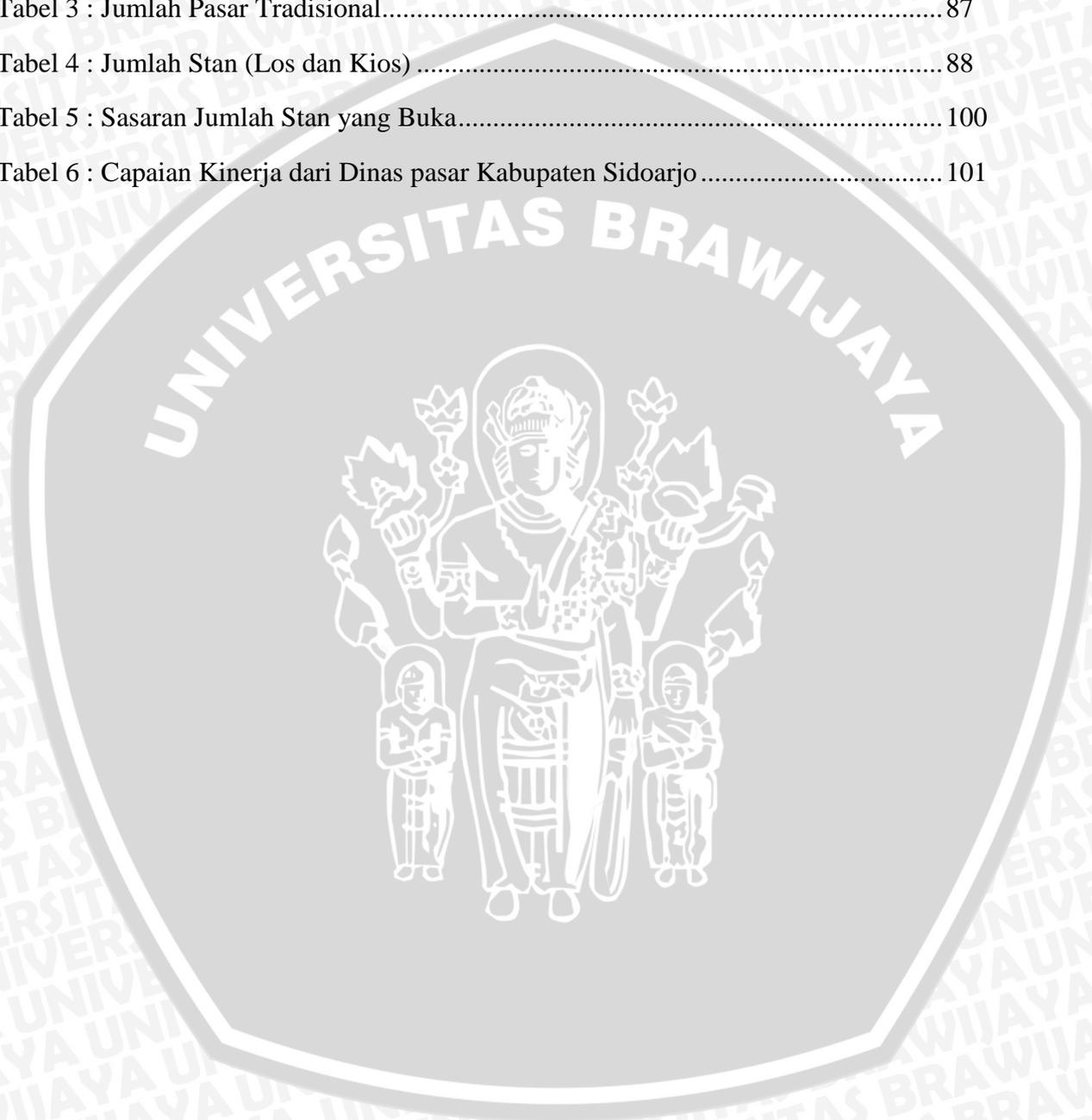
Tabel 2 : Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 S.D 2012..... 86

Tabel 3 : Jumlah Pasar Tradisional..... 87

Tabel 4 : Jumlah Stan (Los dan Kios) 88

Tabel 5 : Sasaran Jumlah Stan yang Buka..... 100

Tabel 6 : Capaian Kinerja dari Dinas pasar Kabupaten Sidoarjo 101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman	56
Gambar 2 : Bagan Struktur Organisasi.....	66
Gambar 3 : Lampiran Dokumentasi	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya keterikatan terhadap pembangunan adalah salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mensejahterahkan penduduknya, dimana mengubah masyarakat di negara berkembang secara terencana, transformatif, sesuai dengan program-program yang sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Sebagaimana yang terdapat dalam tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Dan menurut Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Halim (2002:68) belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode pemerintahan. Secara umum belanja daerah dalam APBD

diklasifikasikan menjadi lima kelompok yaitu : (1) belanja administrasi umum; (2) belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; (3) belanja modal; (4) belanja transfer; dan (5) belanja tak terduga. (Halim, 2002:69)

Secara lebih jelas dijelaskan klasifikasi belanja daerah sebagai berikut :

- a. Belanja Administrasi Umum adalah pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.
- b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah pengeluaran pemerintah yang berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan publik. Kelompok belanja ini terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Hampir sama dengan jenis belanja administrasi umum tetapi bedanya terletak pada objek belanja.
- c. Belanja Transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan pengembalian atau imbalan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran angsuran pinjaman, dana bantuan, dan dana pinjaman.

- d. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga atau kejadian-kejadian luar biasa.
- e. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah biaya yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Jenis belanja ini antara lain belanja publik dan belanja aparatur. (Halim,2002:69)

Menurut pasal 16 Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Otoritas : anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan bekerja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Perencanaan : anggaran menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengawasan : anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- d. Alokasi : anggaran harus diarahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

- e. Stabilisasi : anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dengan adanya desentralisasi maka pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan pembangunan daerah guna memperlancar kehidupan dan perekonomian daerah. Salah satu bentuk pembangunan di suatu negara adalah adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah terdiri dari: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia adalah dengan adanya pasar. Selain karena masyarakat Indonesia cenderung memiliki pola hidup yang konsumtif sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan kalangan menengah ke bawah sehingga pasar merupakan kegiatan ekonomi yang pasti ada di Indonesia. Sebagai gambaran, diperkirakan jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.650 pasar dan terdapat 12.625.000 pedagang di pasar tradisional. Pasar tradisional juga memiliki posisi yang sangat strategis karena masih merupakan wadah utama penjual produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti: petani, nelayan, pedagang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industri rakyat). Namun sayangnya pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih kurang memuaskan (Lubis, 2009:1)

Pasar tradisional merupakan salah satu barometer kemajuan perekonomian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Pasar mampu memotivasi masyarakat untuk terus berkeaktivitas dan memproduksi melalui kegiatan usaha kecil yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat desa (Malano,2011:1). Dengan demikian pasar merupakan

kebutuhan nyata masyarakat. Dalam jangka panjang mempunyai prospek untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Semakin berkembangnya pasar modern, mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya hal ini diperparah oleh kondisi pasar tradisional yang tidak tertata dengan baik, misalnya banyak terdapat pasar tumpah yang menjalar di sekeliling pasar, dan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan.

Sebagai upaya untuk menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu motor penggerak dinamika perkembangan perekonomian suatu kota, maka diperlukan adanya pasar yang dapat beroperasi secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan optimalisasi pelayanan suatu pasar di antaranya dapat dilihat dari pola penyebaran sarana perdagangan, waktu pelayanan pasar, kondisi fisik pasar, jenis dan variasi barang yang diperdagangkan, dan sistem pengelolaan pasar (kelembagaan) pasar itu sendiri.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan perekonomian serta berfungsi menjembatani keinginan produsen

dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar terbagi menjadi dua, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung, bangunan pasar terdiri dari kios-kios, gerai, atau pelataran, dan kebanyakan pasar tradisional menjual barang kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasar modern dicirikan dengan tidak adanya terjadi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode) biasanya pasar modern berada di dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Keberadaan pasar modern tidak akan menggantikan pasar tradisional, karena keduanya sama-sama dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional perlu mendapatkan tempat khusus ditengah lajunya perkembangan kota.

Adanya pasar tradisional di Sidoarjo perlu untuk tetap dijaga karena selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat keberadaan pasar ini juga memiliki keunggulan diantaranya harga yang lebih terjangkau atau murah, keragaman barang dagangan, letak strategis, serta adanya proses tawar-menawar yang menyebabkan keakraban sesama penjual dan pembeli. Namun demikian, pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya kondisi pasar yang kurang nyaman, sesak, tampilan dan desain ruang pasar yang kurang tertata, strategi promosi yang kurang, pemanfaatan dan tata ruang pasar yang kurang maksimal, serta pemeliharaan dan kebersihan pasar yang belum menjadi prioritas

utama merupakan ancaman yang harus dihadapi pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar modern.

Dahulu hampir semua masyarakat Sidoarjo berbelanja di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, memang menjadi pilihan utama karena pada waktu itu belum banyak pilihan berbelanja di pasar modern seperti yang terjadi sekarang. Pada saat itu hampir semua aktivitas jual beli masih dilakukan di pasar tradisional, dengan kondisi harga barang belum membung tinggi, omset dan pendapatan pedagang juga masih tergolong cukup dan tinggi menjadikan kehidupan pedagang pasar menjadi makmur dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kini yang terjadi, omset dan keuntungan pedagang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di akibatkan pasar modern di Sidoarjo ada dimana-mana seperti Ramayana, Matahari, Suncity, Hero dan pembangunan terbaru saat ini adalah Lippo Plaza Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan pengunjung tergoda untuk menikmati berbelanja di pasar modern yang menawarkan fasilitas yang lebih nyaman dibandingkan di pasar tradisional. Beralihnya pengunjung pasar tradisional ke pasar modern dimungkinkan karena banyak faktor, mulai dari faktor internal seperti kurangnya sarana dan prasarana pasar, kurangnya manajemen pengelolaan pasar, kondisi kebersihan pasar yang semakin kotor dan semrawut dan sebagainya. Selain itu beralihnya pengunjung juga dimungkinkan karena faktor eksternal misalnya dari semakin menjamurnya pasar modern bahkan dengan jarak yang dekat dengan pasar tradisional.

Hal tersebut menjadikan pasar tradisional menjadi terpinggirkan dan menurun eksistensinya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang ada diatas maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Sidoarjo.

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perdagangan pasar tradisional Sidoarjo.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu kajian untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengembangan keilmuan administrasi publik khususnya terkait pembangunan daerah.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini bisa dijadikan sarana untuk memberikan sumbangsiah ilmu pengetahuan mengenai konsep pembangunan daerah, sehingga untuk penelitian lain kedepannya diharapkan lebih baik.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat merumuskan konsep pembangunan daerah dalam mendukung rencana pembangunan nasional.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan masukan dalam mendukung konsep pembangunan daerah yang diterapkan sehingga semua kebijakan dan program yang dilaksanakan

pemerintah dapat bermanfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Sebagai bahan kelengkapan daftar bacaan atau referensi bagi Perpustakaan Universitas Brawijaya.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi yang diperoleh dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan tema penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan antara lain: jenis penelitian, lingkup penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data yang digunakan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dan analisa yang dikaitkan dengan dasar-dasar teori yang telah dijabarkan pada tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat dipertimbangkan pihak-pihak terkait dan merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Administrasi Secara Umum

1. Pengertian Administrasi Publik

Definisi atau batasan konsep administrasi publik belum ada kesepakatan dari para ahli ini terlihat dari beberapa pengertian di bawah ini: Menurut Dimock, Dimock dan Fox (Keban, 2004:5) Administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Dalam definisi ini mempunyai makna administrasi publik sama dengan kegiatan ekonomi dan yang dihasilkan adalah barang dan pelayanan publik.

Mengutip beberapa definisi para ahli yang lain mengenai administrasi publik, dapat dilihat pendapat (Syafiie; 2006:23) sebagai berikut :

a) John M Pfifner

Administrasi publik didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

b) Felix Nigro

Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah yang meliputi ketiga cabang pemerintah; eksekutif, legislative, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.

c) Edward H

Administrasi publik merupakan studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

d) Dwight Waldo

Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

e) George J. Gordon

Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif serta pengadilan.

Kemudian Tjiptoherijanto (2010:104) mengemukakan juga bahwa proses administrasi adalah proses yang harus dijalani untuk mencapai tujuan kelompok, artinya proses administrasi tersebut harus dijalani oleh semua pihak yang memiliki tujuan bersama. Sedangkan dari sudut instrument, makna administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan bersama dengan alokasi sumber daya yang efisien.

Tentunya dari beberapa definisi administrasi menunjukkan bahwa administrasi memiliki banyak dimensi, antara lain: politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya dan moral-etika. Selanjutnya Tjiptoherijanto (2010:105) menggambarkan administrasi publik dalam dimensi politik merupakan suatu rangkaian tindakan kompromi diantara berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum dapat dipahami bahwa administrasi publik diikat secara legal oleh hukum formal dimana posisi keberadaan hukum akan mempercepat dan memudahkan penyelesaian konflik. Sedangkan administrasi dalam proses kompromi politis sendiri cenderung dipengaruhi oleh kontrol etika dan moral yang ada.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Syafiie (2006:27-29) mengatakan bahwa ruang lingkup administrasi publik dapat diuraikan sebagai berikut :

Dibidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan meliputi administrasi

pemerintahan pusat; administrasi pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administrative, administrasi department, administrasi non-departement. Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik meliputi: administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM, administrasi kebijaksanaan pemerintah, policy, wisdom, kondisi, peran pemerintah.

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan adalah administrasi negara dan publik yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan menyukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transformasi sosial, pengembangan Weidner dalam Indrajaya dan Pranoto (2011:25).

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1984:12) mengatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Hal ini harus dilaksanakan dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau negara dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) (Siagan (2003:23).

Administrasi pembangunan adalah untuk negara berkembang dan umumnya tidak diterapkan di negara maju, meskipun administrasi negara

di negara maju juga secara aktif terlibat dalam upaya memperbaiki di dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian latar belakang perbedaan antara keduanya terletak pada dua aspek : (1) tingkat perkembangan sosial ekonomi dan sosial ekonomi dan sosial politik sebagai ukuran kemajuan dan (2) lingkungan budaya yang mempengaruhi perkembangan sistem nilai serta penetapan sasaran-sasaran pembangunan Ginanjar Kartasasmita dalam Afiffudin (2011:56).

Definisi sederhana dari pengertian diatas adalah :

1. Pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multi dimensional
7. Pembangunan ditunjukkan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan Negara.

B. Tinjauan Pemerintah Daerah Secara Umum

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah berasal dari istilah Inggris *Local Government* atau istilah Belanda *Local Bestuur*. Kedua istilah asing tersebut dapat mengacu pada fungsi sebagai pemerintah daerah (*local*). Sehingga tak jarang pemerintah daerah sering kali disebut sebagai *Local Government*. Josef R Kaho dalam Jimung (2002:40) mendefinisikan *local government*, sebagai berikut :

“Bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak, serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.”

Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.

Oleh karena itu pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengaplikasikan asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari

rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi munculah otonomi bagi suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) juga ditambahkan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara singkat pemerintahan daerah meliputi:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Konsep Dasar Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata “*autonomy*” dimana “*auto*” artinya sendiri dan “*nomy*” artinya aturan atau undang-undang, jadi *autonomy* artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang no. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang berisi tentang pemberian kewenangan yang luas, nyata

dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

3. Prinsip Dasar Otonomi Daerah

Menurut Kaho (2002:13) mengenai prinsip yang tertuang dalam konseptual otonomi daerah tidak lain meliputi pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah (*delegation of authority*), kemudian meliputi pembagian pendapatan dari daerah yang nantinya disetorkan ke pusat (*income sharing*), keanekaragaman dalam kesatuan (*uniformity in unity*), kemandirian lokal serta pengembangan kapasitas daerah (*capacity building*).

4. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tujuan desentralisasi dan otonomi berdasarkan dua sudut pandang kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu:

- a) Pendidikan politik bagi masyarakat.
- b) Pelatihan kepemimpinan bagi kepala daerah.
- c) Menciptakan stabilitas politik yang kondusif di daerah.

- d) Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara bisa dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah mewujudkan apa yang disebut dengan:

- a) *Politik quality*, yang berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah nantinya diharapkan dapat membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal daerahnya.
- b) *Local accountability*, yang berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya melalui pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan di tingkat daerah.
- c) *Local responsiveness*, disini dimaksudkan pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya di tingkat, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat mempermudah antisipasi pemerintah daerah sampai pada tahap penyelesaian terhadap berbagai masalah atau fenomena sosial yang muncul di masyarakat yang berada dalam naungannya sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi dalam skala nasional.

Tak hanya disitu saja, tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasi pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme hubungan antara negara dan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan untuk membuka akses selebar-lebarnya kepada masyarakat sipil atau umum untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun didalam pelaksanaannya.

Gambaran umum mengenai tujuan ideal dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatas, keberhasilan akan sangat bervariasi serta relatif dan konseptual sifatnya pada tiap-tiap daerah. Melihat kenyataan diatas seringkali pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan adanya disintegrasi bangsa. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena potensi sumberdaya, kelengkapan prasarana sosial ekonomi dan kemampuan kelembagaan daerah (masyarakat) masih sangat terbatas. Kemajuan antar daerah, antar kelompok pendapatan, dan antar sektor kegiatan ekonomi belum sepenuhnya berimbang. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini harus tetap berpegang pada koridor bahwa pembangunan daerah yang ada harus dilakukan dari, untuk dan oleh pelaku-pelaku pembangunan daerah yang bersangkutan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, maka ada beberapa faktor atau syarat yang perlu diperhatikan. Menurut Kaho (2002:59) ada empat faktor yang mempengaruhi otonomi daerah yaitu:

a. Manusia Pelaksananya

Manusia merupakan faktor yang essensial dalam penyelenggara pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam segala aktifitas pemerintahan. Manusalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan oleh karena itu agar sistem pemerintahan berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia sebagai subyek harus baik pula.

b. Keuangan yang Cukup dan Baik

Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena hamper setiap kegiatan membutuhkan dana, maka makin besar dana yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat terlaksana.

c. Peralatan Harus Cukup Baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan pemerintah daerah. Dengan tersedianya peralatan yang baik maka akan lebih efektif dan efisien.

d. Organisasi dan Manajemen Harus Baik

Organisasi dalam arti disini adalah susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya dan

hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan akan tercapai.

C. Pengembangan Kapasitas

1. Pengertian Pengembangan

Kata pengembangan yang termuat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, pembuatan, mengembangkan (Daryanto,1997:350). Sedang menurut S. Pamuji (1985:7) juga mengungkapkan bahwa pengembangan adalah sebagai :

“Suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat.”

Definisi pengembangan menurut Jayadinata (1992:2) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Jadi dalam memudahkan pemahaman konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau memperbaiki yang sudah ada.

Dan juga dari pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengembangan adalah merupakan segala usaha atau perbuatan

untuk memajukan, memperbaiki, secara teratur dan bertahap, serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada dengan apa yang diharapkan.

2. Konsep Pengembangan Kapasitas

Capacity building umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas sering kali didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusannya secara efektif. Pengembangan kapasitas bisa meliputi pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, dan juga asistensi financial, teknologi dan keilmuan. Lebih spesifik dari pengertian diatas, *Capacity building* bagi penyelenggaraan pemerintah didefinisikan sebagai *“the extent to which they (staff) demonstrate concrete contribution to personal, organization and community development”* (sampai seberapa jauh staf mampu menunjukkan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan personal, organisasi dan masyarakat) (Janet L. Finn & Barry Checksoy, 1998:4). Sebagai program yang banyak berhubungan dengan proyek pembangunan Negara dunia ketiga, *Capacity building* telah menjadi bagian pembahasan dalam lembaga internasional; *United Nations* memberi rujukan *Capacity building* yang berdimensi pada; 1) Mandat dan struktur legal, 2) struktur kelembagaan, 3) Pendekatan manajerial, 4) Kemampuan

organisasional dan teknis, 5) kemampuan fiskal local dan 6) Aktivitas-aktivitas program.

Sedangkan dalam buku “Capacity Building in The Public Sector Of Developing Countries” (Merilee S. Grindle, 1997:8) lebih berfokus perhatian pada satu dimensi pengembangan kapasitas atau lainnya. Beberapa kontributor misalnya menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas berfokus terutama pada pengembangan sumberdaya manusia, sedangkan penulis lainnya hanya berfokus pada organisasi atau lembaga. Organisasi dari volume mencerminkan penekanan yang berbeda ini, dengan bagian-bagian yang ditunjukkan untuk masing-masing dari tiga dimensi. Namun demikian Merilee mengkonfirmasi bahwa ketiga dimensi pemerintahan saling terkait dan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya tanggap pemerintah harus selalu menyangkut dari ketiganya. Dan menurut Riyadi (2003:10) faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah : komitmen bersama, *leadership* yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan dan peningkatan kekuatan dan kelemahan yang diminimalisir.

3. Komponen Penetapan Strategi Pengembangan Kapasitas

Menurut Salusu (2002:23) komponen yang harus dikenali dan diperhatikan dalam menetapkan strategi adalah sebagai berikut :

a. Tipe dan struktur organisasi

Setiap organisasi memiliki kepribadian yang khas. Tipe dan struktur yang dipilih untuk digunakan harus berkaitan dengan kepribadian yang dimaksud. Secara tradisional, tipe dan struktur yang paling banyak digunakan adalah tipe yang hierarki atau pyramid. Tipe demikian cocok untuk organisasi besar, kompleks dan kultur organisasi membenarkan berlakunya jarak kekuasaan dan oleh karena itu memerlukan berbagai lapisan kewenangan.

b. Gaya Manajerial

Para teoritis dan praktisi yang mendalami teori kepemimpinan dan gaya manajerial dalam mengelolah organisasi yang besar dan kompleks menekankan beberapa hal. Pertama; kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional. Kedua; gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkatan kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi (pengetahuan, pendidikan, mental, intelektual maupun secara emosional). Ketiga; peranan manajerial apa yang diharapkan dalam organisasi (simbol organisasi atau pemrakasa visi kedepan bagi organisasi tersebut).

c. Kompleksitas Lingkungan

Bahwa setiap organisasi menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda-beda dimana cenderung bersifat dinamis. Gerakan yang

sangat dinamis tersebut tentunya berpengaruh terhadap cara kelola organisasi, termasuk dalam merumuskan dan menetapkan strategi.

d. Hakikat Berbagai Masalah yang Dihadapi

Jika dikatakan bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang diambil oleh manajemen puncak, salah satu implikasi pernyataan tersebut ialah bahwa manajemen puncak harus merupakan orang-orang yang cekatan memecahkan masalah, terlepas apakah masalah itu rumit dan mempunyai dampak kuat untuk jangka panjang atau relative sederhana dan dengan dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat jangka pendek atau sedang. Yang jelas ialah bahwa pendekatan dan teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah harus berhasil mencabut akar permasalahan dan tidak sekedar mengobati gejala-gejalanya saja. Tentunya diperlukan kemampuan melakukan analisis informasi sehingga analisis yang dilakukan tampak berbagai alternative yang mungkin ditempuh. Guna pelaksanaannya berjalan sukses tentunya dibutuhkan dukungan berbagai pihak yang bekerja di dalamnya.

4. Tingkatan – Tingkatan Dalam Strategi

Menurut pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer (Salusu, 2002:101) menjelaskan ada empat tingkatan dalam strategi yang keseluruhannya biasa disebut dengan *Master Strategy* yaitu sebagai berikut:

a. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat di kontrol.

Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan ada berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok ini mempunyai *interest* dan tuntutan yang bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberikan perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi dalam strategi *enterprise* terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Respon terhadap keinginan masyarakat perlu diberi pertimbangan-pertimbangan etis.

b. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga perlu disebut juga dengan *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi *non-profit*.

c. *Bussiness Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para anggota legislative, para donor, para politisi dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan strategi yang sekaligus dapat menunjang perkembangannya suatu organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu sebagai berikut:

- 1) Strategi Fungsional Ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi Fungsional Manajemen yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen, seperti planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing dan interating.

- 3) Strategi Isu Strategik fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah dalam era-otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna untuk meningkatkan pendapatannya. Daerah tidak dapat terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah.

Dalam pasal-pasal dan penjelasan umum undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan di daerah, tidak ditemukan suatu perumusan pasti tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapat yang diusahakan sendiri oleh daerah untuk memungutnya dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dengan mengusahakan dan mengolah sendiri sumber – sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah untuk dimanfaatkan dan dioptimalkan penerimanya, sehingga dapat menunjang dan menambah pendapatan daerah. Dengan kata lain PAD adalah

pendapatan yang bersumber dari daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah tersebut.

Adapun sumber keuangan daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah “pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah”, sedangkan PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.

2. Pengertian Pajak Daerah

Selain retribusi, pajak merupakan sumber keuangan yang pokok bagi daerah oleh karenanya pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2002:1) ialah “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2002:98) mengatakan bahwa : “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Dari sini Davey (1988:39) juga memberi beberapa arti yang pada intinya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Pajak daerah dipungut atas dasar peraturan daerah tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

- c. Pajak daerah ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak daerah dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pemungutan diberikan, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Sebagai sumber penerimaan pokok bagi daerah, pajak harus dikelola secara optimal seperti halnya harus paling digali potensinya agar dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan daerah. Kewenangan atas otonomi keuangan daerah diarahkan pada pemanfaatan sumber-sumber atau obyek-obyek pajak agar dapat membiayai pengeluaran daerah. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah, pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Pengelolaan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dirinci pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pajak propinsi terdiri atas :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak reklame.
- d. Pajak penerangan jalan.
- e. Pajak pengambilan dan pengelolaan galian golongan C.
- f. Pajak parkir.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah daerah tingkat II hanya memiliki 6 (enam) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana sebagian besar terbukti hanya memiliki peranan yang relatif kecil bagi kemandirian daerah.

3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, sosial, dan pembangunan, yang tentunya semua itu mengandung beberapa sasaran yang ingin diperoleh diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
- b. Pendistribusian pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata bagi masyarakat berpenghasilan sama (*horizontal equity*).

- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan pada pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya. Pemerintah daerah harus mendapatkan pemasukan-pemasukan yang nantinya dipergunakan dalam melakukan pengeluaran-pengeluaran daerahnya. Sebaiknya dalam hal ini dilakukan berdasarkan atas suatu penyusunan anggaran daerah yang telah sah, hal inilah yang terus diperbaiki mekanismenya.

Penerimaan pendapatan asli daerah dapat dikemukakan sumber-sumbernya menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 33 tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah

Merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai sarana pembiayaan kegiatan daerah yang masuk ke dalam kas daerah. Pemasukan daerah dalam hal ini terbatas harus pada kaidah yang berada dalam kerangka dasar program perekonomian nasional, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 33

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi titik awal yang legal atas peraturan atau kebijakan keuangan daerah, seperti yang tertera tujuan pokok Undang-Undang tersebut.

Penerimaan pendapatan asli daerah dalam hal ini haruslah berada dalam kerangka dasar dari program perekonomian nasional. Dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dapat menjadi acuan atas kebijakan keuangan daerah, serta secara garis besar bahwa tujuannya adalah untuk memberdayakan dan juga meningkatkan perekonomian di daerah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab serta ada kepastian.

Untuk mewujudkan sistem perimbangan antara pemerintah pusat yang mencerminkan pembagian tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi acuan dalam alokasi penerimaan bagi Negara dan khususnya untuk daerah. Jadi disini perlu adanya penegasan sistem pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah yang menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pasal 6 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah.

2. Dana Perimbangan.
 3. Lain-lain Pendapatan.
- b. Pembiayaan yang bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Cara yang ditawarkan oleh Kaho (2003:139) , untuk mendapatkan sumber keuangan daerah antara lain :

- a. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
- b. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga atau melalui pemerintah pusat.
- c. Ikut ambil bagian dalam pajak sentral yang dipungut daerah.
- d. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu.

Seperti yang tergambar dalam APBD bahwa daerah memiliki sumber keuangan dari Pendapatan Asli Daerah dan Non Pendapatan Asli Daerah yang mana PAD dapat digali dari sektor pajak, retribusi, perdagangan, perusahaan milik daerah, dan dinas-dinas yang dapat diambil nilai ekonomisnya, maupun pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan non PAD, mayoritas dipenuhi oleh

adanya subsidi oleh pemerintah pusat dan pinjaman-pinjaman yang dapat dilakukan melalui pusat maupun daerah yang melakukannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan bantuan subsidi tertentu adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bersangkutan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah daerah tentunya dalam hal financial.

5. Upaya Meningkatkan PAD dari Sektor Perdagangan

Upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan otonomi daerah. Pemerintah daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan dalam arti sampai berapa jauh dapat menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan pada bantuan ataupun subsidi dari pemerintah pusat. Hal inilah sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Semua itu memerlukan biaya yang pada dasarnya harus digali pada sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Oleh karena itu intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber keuangan daerah di bidang perpajakan dan retribusi, termasuk iuran pembangunan daerah merupakan usaha yang harus ditingkatkan, tentunya harus pula diimbangi dengan perbaikan sistem administrasi perpajakannya agar terjadi pemanfaatan hasil pajak secara efektif dan efisien.

Dari sini dapat dikatakan bahwa keberhasilan intensifikasi, ekstensifikasi dan penerapan sistem administrasi tergantung pada usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kesadaran dari wajib pajak dalam mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah.

E. Konsep Pasar

1. Pengertian Pasar

Dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi, yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang (Sadono Sukirno, 2003:25). Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1, yang dimaksud dengan pasar adalah lembaga ekonomi dimana para penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan

transaksi perdagangan barang dan jasa. Dalam hal suatu analisis ekonomi, pasar memiliki pengertian yang tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu tetapi meliputi suatu daerah, negara maupun dunia internasional. Hal ini bisa dilihat, misalnya pada pasar untuk karet dan timah, bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual dan beli karet dan timah di suatu kampung atau wilayah tertentu tetapi meliputi interaksi diantara produsen – produsen dan para pembeli karet dan timah di seluruh pelosok dunia.

Pasar di mana penjual dan pembeli melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana penjual dan pembeli dari suatu barang dan jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah serta harga barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat dimana pasar pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah kebulatan dari permintaan dan penawaran akan barang dan jasa tertentu oleh pihak – pihak penjual dan pembeli, dengan kata lain pasar sebagai penghubung produsen dan konsumen dimana pasar biasanya berupa area wilayah tertentu atau tempat yang terdapat sekelompok orang – orang yang melakukan transaksi jual beli.

2. Jenis Pasar

Pasar dapat didefinisikan sebagai “kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual-beli, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>).

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari – hari seperti bahan – bahan makanan berupa ikan, buah, sayur – sayuran, telur, daging, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain – lainnya. Selain itu, ada pula yang menjual kue – kue dan barang – barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

b. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat tabel harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) dan dilayani oleh pramuniaga. Barang – barang yang dijual, selain bahan makanan – makanan seperti

: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermart, supermarket, dan mini market. Contoh pasar modern di Kabupaten Sidoarjo Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Suncity, Hero dan yang terbaru Lippo Plaza.

3. Fungsi dan Peran Pasar

Pasar memiliki lima fungsi utama. Kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan – pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi. Dalam Pedoman Umum Manajemen Pasar Profesionalisasi Manajemen Aset Pasar dan Terminal, fungsi – fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasar menetapkan nilai (sets value). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih tinggi dibandingkan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Produsen menghasilkan barang yang lebih diinginkan masyarakat akan mendapat keuntungan yang lebih besar.
- b. Pasar mengorganisasikan produksi. Dengan adanya harga – harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen untuk memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa faktor – faktor produksi selalu mempunyai

kemungkinan substitusi. Apabila salah satu faktor produksi mengalami peningkatan harga, maka produsen akan berusaha mencari pengganti. Fungsi pasar ini menunjukkan bagaimana cara menghasilkan barang.

- c. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang tergantung dari tingkat pendapatannya. Pendapatan seseorang selain tergantung dari jumlah faktor produksi yang dimiliki juga tergantung pada harga dari faktor produksi tersebut, fungsi ketiga ini menjelaskan untuk siapa barang tersebut dihasilkan.
- d. Pasar berfungsi sebagai penyelenggara penajatahan. Dalam jangka waktu tertentu jumlah produksi yang tersedia menjadi terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, barang dilakukan penajatahan. Apabila terdapat barang dengan jumlah yang relatif sedikit maka tingkat harganya akan relatif tinggi dan pada akhirnya akan membatasi tingkat konsumsi.
- e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan masa yang akan datang. Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai lokus transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi, menekan biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan (trust). Pasar melalui mekanisme harga diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah pokok ekonomi yaitu produksi,

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode penelitian yang sangat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevandengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan yang dikaji berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena metode penelitian memberikan jalan ke arah pemecahan masalah yang akan diteliti serta memungkinkan bagi peneliti lain untuk menguji suatu hasil penelitian. Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Menurut Hasan (2002:9) pengertian penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/masalah dengan perlakuan tertentu (seperti

memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencari kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2008 : 8) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi”.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode ethnography, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode penelitian ini menggunakan pandangan postpositivisme, yakni epistemologi penelitian dan sekaligus analisis yang mengutamakan pendekatan emansipatoris, demokratis dan deliberatif. Pandangan postpositivisme juga digunakan untuk menganalisis pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008 :8-9).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisa data kualitatif yang mendeskripsikan atau menjelaskan

peristiwa dan kejadian yang ada sekarang yang tidak dibuktikan dengan angka-angka melainkan dengan uraian-uraian.

Penggunaan metode deskriptif adalah merupakan upaya untuk menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, di mana atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi objek penelitian. Sejalan dengan tujuan penelitian, Dengan demikian penggunaan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif merupakan metode yang sesuai untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Maka metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Spradley (dalam Sugiyono, 2008: 377-379) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Fokus penelitian

merupakan titik pusat perhatian suatu masalah dari suatu penelitian agar penelitian menjadi terarah, efektif dan efisien.

Menurut Moleong (2006:62-63) tujuan dari pengambilan fokus penelitian adalah:

“Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu, pertama penetapan fokus membatasi studi. Dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Misalnya jika kita membatasi diri dari upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi eksklusif atau memasukan mengeluarkan (inclusion exclusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan, sehingga dengan menetapkan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu diambil ataupun mana yang akan dibuang”.

Obyek yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.

- a. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dinas Pasar

Dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perlu dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada manusia itu sendiri terutama pada aparat dinas pasar dan para pedagang dengan berbagai macam metode pendidikan formal maupun non-formal misalnya training, magang, sosialisasi, dan pemputusan pegawai profesional, manajerial dan teknis.

b. Meningkatkan Pendapatan Pasar

Dengan mengoptimalkan potensi pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Meningkatkan Kapasitas Stan

Dengan menyediakan stan dagang yang lebih banyak sehingga para pedagang mempunyai tempat untuk berjualan dengan layak.

d. Meningkatkan Fasilitas Penunjang

Dengan menyediakan Kapasitas Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan di pasar tradisional.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

a. Faktor pendukung

b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian penelitian terhadap situs ini didasarkan pertimbangan bahwa lokasi atau tempat tersebut memungkinkan untuk diperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Sumber dan Jenis Data

Keberadaan sumber data memang memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Arikunto (2006:129) bahwa: “Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian, baik primer maupun sekunder merupakan objek dari data yang diperoleh, atau subjek di mana data melekat.

Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklarifikasian data, maka sumber data dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P, menurut Arikunto (2006: 129) yaitu:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban yang tertulis melalui angket/ kuisisioner. Oleh karena itu

sumber data ini adalah berupa orang per orang yang dapat dijadikan sumber penelitian melalui wawancara.

- b. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Hal ini berkaitan dengan lokasi dan objek penelitian di Kabupaten Sidoarjo.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dan arsip yang berada di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut Sugiyono (2008: 225) sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data informan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).
- b. Kepala Dinas Pasar Sidoarjo.
- c. Staff dan Karyawan Dinas Pasar Sidoarjo.
- d. Para Pedagang Pasar Tradisional dan Masyarakat Sidoarjo.

2. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Gambaran Umum mengenai wilayah kabupaten Sidoarjo, meliputi kondisi geografis, kependudukan, dan data pemerintahan.
 - b. Gambaran khusus mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kapasitas pasar tradisional sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perdagangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan merupakan pendukung utama dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data . Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu proses mencari atau memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informann, dengan maksud agar mendapatkandata-data, keterangan-keterangan, pandangan maupun pendapat responden agar diperoleh kebenaran yang valid dan relevan. Menurut Sugiyono (2008: 231), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian informasi yang didapatkan tersebut dikembangkan lebih lanjut selama dan setelah wawancara berlangsung. Dalam penelitian di lapangan bisa jadi jumlah informan bertambah karena perkembangan hasil wawancara untuk memperoleh informasi yang dianggap berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan cara dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai

dokumen tertulis (peraturan perundang- undangan, surat keputusan, dan ketentuan lain) sebagai bahan referensi dan komparasi. Dokumen-dokumen tersebut tentunya yang berhubungan dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.

F. Instrumen Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
- b. Pedoman Wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara
- c. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan (*fiel note*). *Fiel note* menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006: 209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
- d. Dokumen, peraturan, dan arsip-arsip.

G. Metode Analisis

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menguraikan, menginterpretasikan dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan.

Alasan penggunaan data kualitatif adalah karena jenis penelitian yang dipilih merupakan penelitian deskriptif yang akan berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang ada. Dalam upaya memberikan penjelasan tentang fenomena tersebut akan lebih mudah dipahami apabila data yang ada lebih yang berupa kata-kata maupun kalimat daripada yang berupa angka.

Menurut miles dan Huberman (1992:15) mengemukakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan, yaitu :

1. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan reduksi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

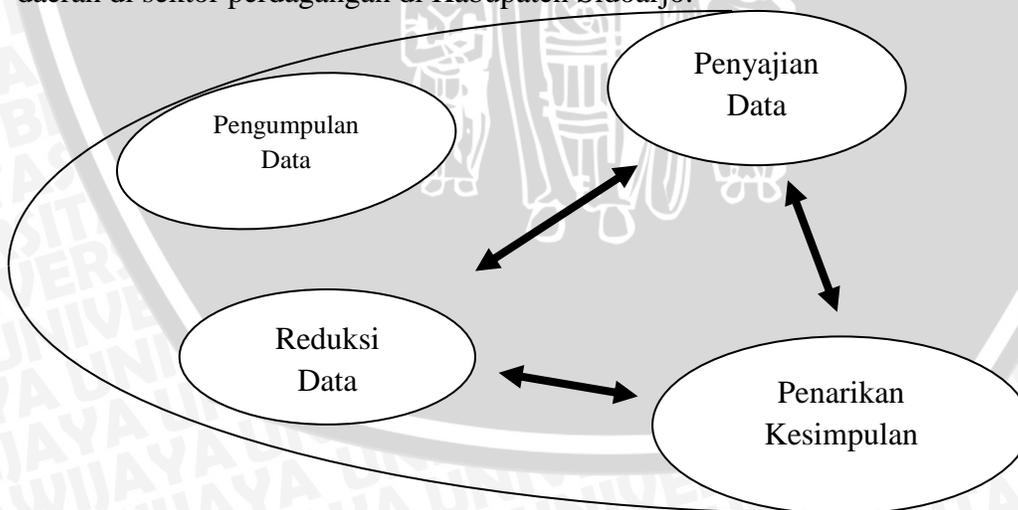
Penyajian adalah sambungan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui

penyajian nyata, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami. Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk kalimat maupun uraian.

3. Penarikan kesimpulan

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sebenarnya kemudian disimpulkan.

Analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat umum dan menyeluruh tentang hal-hal yang tercakup dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman
Sumber : Miles, M. B and Huberman AM, An Expenden Source Book, Qualitative Data Analysis (London: Sage Publication, 1984), diolah

Maka sesuai dengan tujuan peneliti, analisis terhadap data-data adalah ketika peneliti berada di lapangan (bersama dengan pengumpulan data) sampai dengan pembuatan laporan penelitian, karena penelitian kualitatif adalah bentuk siklus, yaitu setiap informasi baru harus diikuti perkembangannya sebagai data terbaru untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena di lapangan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihimpit dua sungai, sehingga terkenal dengan Kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 – 112,90 Bujur Timur dan 7,30 – 7,50 Lintang

Selatan. Batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan laut yang dinamakan Selat Madura.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 71.424,25 Ha, 40,81 % terletak diketinggian 3 – 10 m yang berada dibagian tengah dan berair tawar, 29,99 % berketinggian 0 – 3 meter berada disebelah Timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan, 29,20 % terletak diketinggian 10 -25 meter berada dibagian barat.

Kabupaten Sidoarjo berada disekitar garis katulistiwa, maka seperti di Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, wilayah ini mempunyai

perubahan musim sebanyak 2 kali setiap musimnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim Penghujan berkisar di bulan Oktober sampai dengan Bulan April dan di bulan selebihnya yaitu bulan Mei sampai september adalah musim kemarau. Adapun Lokasi penangkar Hujan menyebar di 17 Kecamatan kecuali di Kecamatan 11 Tulangan tidak ada lokasi penangkar hujan. Curah Hujan di Kabupaten Sidoarjo yang cukup tinggi terjadi di bulan Februari dan hari hujan terbanyak terdapat di bulan Februari.

Topografi Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu wilayah yang mempunyai beberapa beberapa lapisan batuan, untuk batuan Alluvium seluas 686,89 tersebar di semua kecamatan yang ada di Sidoarjo, tapi untuk Lapisan batuan Plistosen Fasien Sedimen hanya terdapat di 6 kecamatan antara lain Kecamatan Sidoarjo 0,4 Km, Buduran 14,69 Km, Taman 4,48 Km, Waru 3,84 Km, Gedangan 0,38 Km, dan Sedati seluas 3,55 Km. Sedangkan lapisan tanah untuk Alluvial kelabu merata di 18 Kecamatan seluas 470,18 Km, Lapisan tanah jenis As. Alluvial Klb dan coklat kekuningan hanya di 4 kecamatan krebung, Balongbendo, Tarik dan Prambon masing – masing 4,54 km, 27,95 Km, 9,87 Km, dan 7,33 Km. Lapisan tanah Alluvial Hidromorf seluas 213,61 Km menyebar di 8 Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Tanggulangin, Jabon, Waru, dan Sedati, adapun lapisan tanah kelabu Tua seluas 8,71 Km di 2 kecamatan buduran dan Gedangan Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin

dan tawar, ada 8 Kecamatan yang sebagian wilayah rasa airnya asin seluas 163,13 Km dan 10 kecamatan murni air tawar.

2. Kondisi Perekonomian Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki lokasi strategis dikarenakan termasuk kawasan GERBANG – KERTOSUSILO dan merupakan *hinterland* dari kota Surabaya yang berpengaruh besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif sangat cepat. Beberapa faktor pendukung dari pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo yang sedemikian pesat, diantaranya : memiliki dukungan infrastruktur dan *utilitas* yang baik (jalan, bandara, terminal, telekomunikasi, dan sebagainya) dan sebagai kota industri yang didukung dengan kegiatan perikanan dan pertanian yang maju.

Pada tanggal 28 Juli 2009 ditetapkannya Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 oleh Bupati saat itu Win Hendrarso. Dalam Perda tersebut Pasal 68 dinyatakan bahwa Siborian termasuk menjadi salah satu kawasan strategis pembangunan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pada pasal 74 lebih lanjut dinyatakan bahwa Siborian adalah kependekan dari Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, dan By Pass Kecamatan Krian yang dikembangkan untuk kawasan industri dan perdagangan. Pengembangan kawasan tersebut meliputi: Kecamatan Sidoarjo yaitu

berada di sepanjang Jalan Lingkar Timur Sidoarjo untuk pengembangan industri dan perdagangan; Kawasan Jabon akan dikembangkan kawasan mix use untuk kegiatan industri; dan pengembangan By Pass Krian untuk kawasan industri dan perdagangan. Kawasan mix use, merupakan penggunaan lahan campuran dimana terdapat beberapa kegiatan yang menjadi satu area yang berdekatan seperti permukiman, perdagangan dan jasa, pemerintahan serta industri yang terdapat pada satu lokasi

Siborian memiliki daya tarik bagi investasi usaha karena adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing kawasan industri tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa kedekatan Kabupaten Sidoarjo dengan ibukota provinsi Jawa Timur (yaitu Surabaya) merupakan daya tarik utama karena kota Surabaya memiliki hampir seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh industri, seperti besarnya jumlah konsumen produk industri, sumber-sumber daya yang diperlukan bagi industri (manusia, pembiayaan/ perbankan, mesin-mesin, dan sebagainya), serta adanya pelabuhan udara dan dermaga laut bagi kepentingan distribusi produk baik domestik maupun internasional.

Keterdekatan kawasan Siborian dengan kawasan industri lain (Surabaya Industrial Estate / SIER, Kawasan industri Ngoro, Pasuruan Industrial Estate Rembang / PIER) serta banyaknya industri-industri kecil penunjang di sekitar Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

juga menjadi daya tarik tersendiri, karena menyediakan bahan baku utama dan penunjang bagi kegiatan industri. Pengembangan lokasi usaha dan industri serta penanaman modal, khususnya sektor perdagangan dan industri manufaktur besar pada akhirnya merambah pada kawasan-kawasan yang berdekatan dengan ibukota provinsi. Dalam hal ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang sangat memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi suatu investasi. Kenyataan tersebut terbukti dengan semakin bertambahnya penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan aktivitas usaha dan produksinya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3. Pemerintahan Sidoarjo

Pemerintah umumnya merupakan suatu sistem yang mengatur tentang segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah yang meliputi segala aspek kehidupan dengan berdasarkan norma-norma tertentu. Pemerintah Kota Sidoarjo dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh Wakilnya serta Sekertaris Daerah.

Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 [kecamatan](#), yang dibagi lagi atas sejumlah [desa](#) dan [kelurahan](#). Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo diantaranya [Taman](#), [Krian](#), Candi, Porong, Gedangan, Tarik, Sidoarjo dan [Waru](#). Dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

b. Dinas – Dinas (15 Dinas)

- 1). Dinas Bina Marga
- 2). Dinas Cipta Karya dan Permukiman
- 3). Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 4). Dinas Kelautan dan Perikanan
- 5). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6). Dinas Kesehatan
- 7). Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM
- 8). Dinas Pasar
- 9). Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- 10). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 11). Dinas Pendidikan
- 12). Dinas Pengairan
- 13). Dinas Perhubungan
- 14). Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- 15). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

c. Lembaga Teknis

1. Badan (7 Badan), terdiri dari :

- a). Badan Kepegawaian Daerah
- b). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- c). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
- d). Badan Lingkungan Hidup

- e). Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
 - f). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
 - g). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - 3). Kantor Perpustakaan dan Arsip
 - 4). Satuan Polisi Pamong Praja
 - 5). Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
 - 6). Kecamatan (18 Kecamatan) terdiri dari :Tarik, Prambom, Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Tulangan, Wonoayu, Sukodono, Sidoarjo, buduran, Sedati, Waru, Gedangan, Taman, Krian, Balongbenda
2. Aparat Pemerintahan Daerah Untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, hingga saat ini kondisi SDM atau PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terdapat 12.291 PNS yang terdiri dari 5.819 laki-laki dan 6.472 perempuan dengan latarbelakang pendidikan bervariasi dari tingkat SD sampai S2 baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri dengan gambaran sebagai berikut : S2 312 orang, S1 5.157 orang, Diploma/Akademi 2.843 orang, SLTA 3.361 orang SLTP 330 orang, SD 288 orang

B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

1. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Visi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo adalah “Menjadikan Pasar Tradisional Sebagai Pendorong Utama Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi”. Pernyataan Visi dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Pasar sebagai lembaga yang profesional dalam mengelolah pasar tradisional sebagai pendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan *good governance*.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditentukan, maka Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Bersama instansi terkait, menumbuh kembangkan potensi sektor perdagangan secara optimal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan tempat jual/ beli pasar (kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan) pedagang dan konsumen yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman.
3. Meningkatkan pendapatan retribusi pasar sesuai dengan potensi yang ada.
4. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif di area pasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pedagang.

Dari misi di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pasar berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada baik dari segi pedagangnya maupun dari fasilitas yang sudah tersedia sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Sidoarjo melalui sektor perdagangan.

2. Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Guna menjabarkan misi yang telah dirumuskan dan dalam rangka memberikan arah pada program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo maka perlu ditetapkan tujuan dan sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas pasar dibebani tugas sebagai berikut:

1. Mengelola sarana/prasarana pasar yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pedagang;
2. Tercapainya target pendapatan pasar setiap tahunnya.

Meningkatkan kualitas sarana/prasarana dan pendapatan merupakan tujuan utama yang nantinya juga berujung pada proses pembiayaan pembangunan daerah. Hal itu juga mendukung otonomi daerah yang mengharuskan setiap daerah mempunyai sistem pengelolaan kekayaan dan sumber pendapatan yang mandiri sehingga dapat menekan tingkat ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat.

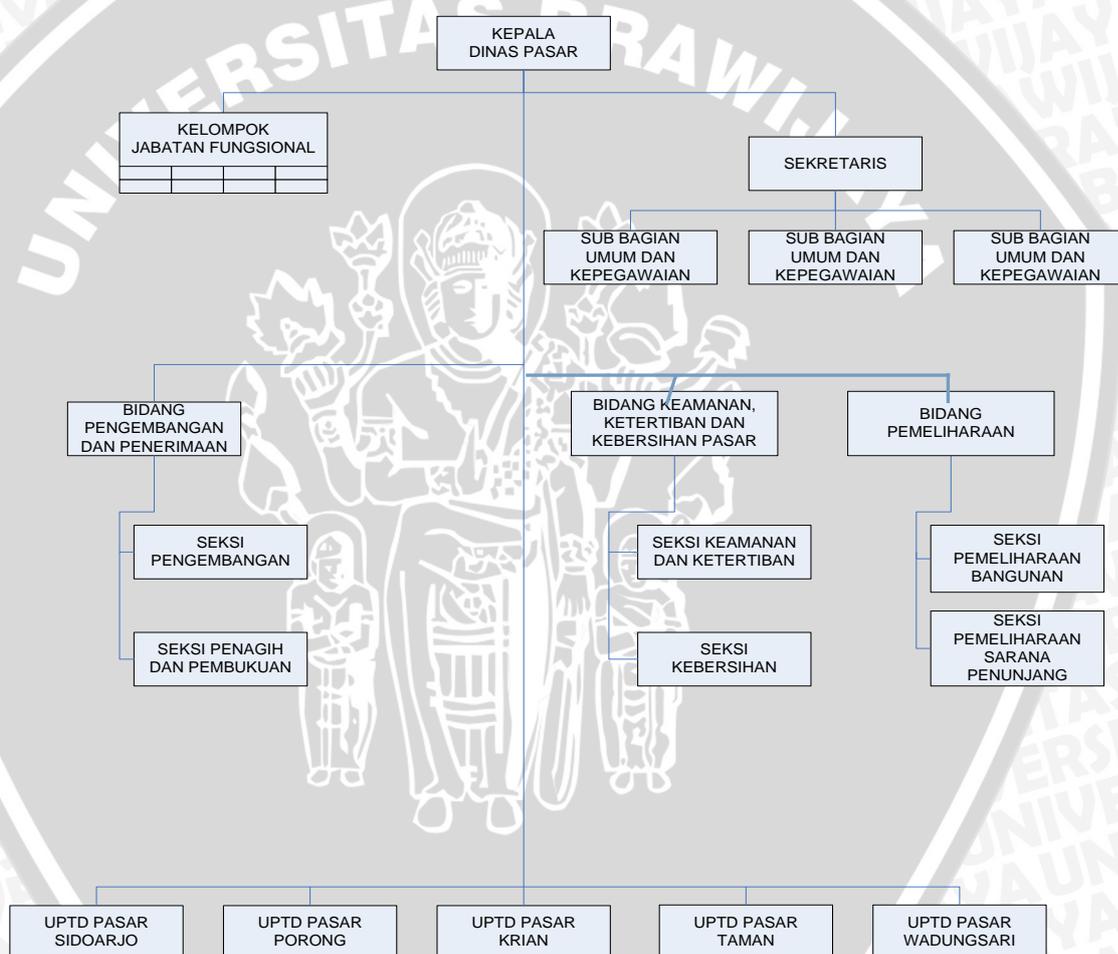
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah

Kabupaten Sidoarjo, struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersusun dalam bagan dibawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR KABUPATEN SIDOARJO**

Perda No. 21 Tahun 2008



Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 48 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pasar Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

1. Kedudukan dan susunan organisasi adarah sebagai berikut :
 - a. Dinas pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah;
 - b. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekrearis Daerah.
2. Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagian dari bidang perdagangan dalam penyediaan pasar.
3. Fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pasar;
 - 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pasar,
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pasar, berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 48 tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Staf : Sekretariat

Terdiri dari :

- 1) Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana : Bidang

terdiri dari :

- 1. Bidang pengembangan dan penerimaan, terdiri dari ;
 - a) Seksi pengembangan;
 - b) Seksi Penagitrان dan Pembukuan.
 - 2. Bidang Keamanan Ketertiban, dan Kebersihan pasar, terdiri dari;
 - a) Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - b) Seksi Kebersihan.
 - 3. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari;
 - a) Seksi Pemeliharaan Bangunan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Sarana Penunjang.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPID), terdiri dari :
- 1. Kepala UPT Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usahq
 - 3. Jabatan Fungsional
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Tugas-Tugas Bidang

a. Tugas Kepala Dinas:

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan menyelenggarakan kegiatan Dinas Pasar.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan Program bidang pengembangan dan penerimaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar, pemeliharaan gedung serta kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan- pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

3. Pengelolaan administrasi keuangan;
 4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan

Mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Teknis;
 2. Menerima melaporkan dan mengkoordinasikan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan umum;
 3. Menyusun laporan.pelaksanaan kegiatan Dinas;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Tugas sub bagian umum darr kepegawaian.

Mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
2. Melaksanakan pengelolaan barang;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Metaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Tugas sub bagian keuangan

Mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran.

2. Mengelola administrasi keuangan;
 3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Tugas bidang pengembangan dan penerimaan

Bidang Pengembangan dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar dibidang pengembangan dan penerimaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Penerimaan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan petunjuk teknis pengembangan serta penagihan dan pembukuan;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program petunjuk teknis pengembangan serta penagihan dan pembukuan, serta fasilitas pelayanan;
 3. Pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan serta penagihan dan pembukuan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Tugas seksi pengembangan
- Mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengembangan;

2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengembangan;
 3. Menyiapkan usulan program pembinaan pengembangan sumber daya manusia dinas pasar;
 4. Menyiapkan bahan percncanaan penerimaan/pendapatan pasar dan pendapatan lain yang dikelola pasar;
 5. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber-sumber penerimaan dan penerimaan lain yang dikelola pasar dalam rangka pendayagunaan sumber-sumber penerimaan yang ada;
 6. Memberikan informasi tentang perkembangan sumber-sumber penerimaan lain yang dikelola pasar serta wajib€ distribusi;
 7. Melaksanakan ketatausahaan Bidang;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Tugas seksi penagihan dan pembukuan
- Mempunyai tugas :
1. Menyiapkan penyusunan program penagihan dan pembukuan;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis penagihan dan pembukuan;
 3. Menerima dan menyettor tangsung hasil pelagihan retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan penyettor Dinas pasar;
 4. Mengadakan penagihan kepada wajib retribusi yang menunggak;

5. Melaksanakan Pendataan nama-nama wajib retribusi pada buku besar;
6. Membukukan semua penerimaan atau penyetoran berdasarkan bukti penerimaan atau penyetoran yang diterima dari Bendaharawan penerima dan Penyetor Dinas Pasar;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepata Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - i. Tugas bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar
Bidang Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pasar di bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas:
 1. Penyusunan program dan petunjuk teknis keamanan dan ketertiban serta kebersihan;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program keamanan dan ketertiban, kebersihan serta fasilitas pelayanan;
 3. Pembinaan personil keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan serta penagihan dan pembukuan;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - j. Tugas seksi keamanan dan ketertiban

Mempunyai tugas :

1. Menyiapkan penyusunan program keamanan dan Ketertiban;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis keamanan ketertiban;
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban;
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan keamanan, ketertiban pasar Pedagang Kaki Lima di lingkungan pasar.
5. Melaksanakan Patroli Keliling atau ronda dalam usaha menjaga keamanan dilingkungan pasar
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keamanan terhadap kerawanan kemungkinan pencurian dan bahaya kebakaran;
7. Mengadakan penyegelan dan atau pembukaan kembali bedag (stan) serta fasilitas lainnya;
8. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan penturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pasar;
9. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar;
10. Memberikan informasi atau taporan tentang peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pasar;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dengan bidang tugasnya.

k. Tugas seksi kebersihan

Mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program kebersihan;
2. Menyiapkan bahan koordinasidan pelaksanaan teknis kebersihan;
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kebersihan;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kebersihan pasar;
5. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebersihan pasar;
6. Perlu diambil dalam rangka kebersihan pasar oleh pedagang kaki Lima di lingkungan pasar;
7. Melaksanakan penyusunan dan pemantauan program pengendalian pencemaran lingkungan pasar;
8. Melaksanakan ketatausahaan Bidang;
9. Melaksanakan tugas lain yang ditierikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

l. Tugas bidang pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang pemeliharaan dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan petunjuk teknis pemeliharaan bangunan, pemeliharaan sarana penunjang;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis pemeliharaan bangunan, sarana penunjang serta fasilitas pelayanan;

3. Pelaporan pelaksanaan tugas pemeliharaan bangunan, pemeliharaan serta sarana penunjang;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- m. Tugas seksi pemeliharaan bangunan.

Mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pemeliharaan bangunan;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pemeliharaan bangunan:
 3. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap gedung dan peralatan pasar;
 4. Membuat usulan perbaikan atau peralatan pasar;
 5. Melaksanakan ketatausahaan Bidang;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- n. Tugas seksi pemeliharaan sarana penunjang

Mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pemeliharaan sarana penunjang;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pemeliharaan sarana penunjang;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap petnakaian air, listrik dan sarana penunjang pada pasar-pasar;

4. Mengupayakan penghematan air, listrik dan sarana penunjang dan pasar-pasar;
 5. Membuat hasil laporan pengawasan pemakaian air, listrik dan sarana penunjang setiap bulan ;
 6. Memelihara dan menjaga kelancaran air, penerangan dan sarana penunjang di dalam pasar;
 7. Mengatur penyelenggaraan administrasi air, penerangan dan sarana penunjang pasar;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang pelayanan umum;
 2. Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar dan prrrbirraarr teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara operasional dikoordinasikan oleh Camat diwilayah kerjanya.
- p. Tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pasar terdiri :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sidoarjo membawahi pasar Larangan, Loak, Sayu Suko dan Buduran;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Taman membawahi Pasar Taman dan Sukodono;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Krian membawahi Pasar Krian, Wonoayu, Prambon, Watutulis dan Tarik;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Porong membawahi Pasar Porong, Krembung, Tulangan dan Bulang
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Wadungasri membawahi Wadungasri, Waru dan Gedangan;
- q. Tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pasar

Mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan umum di Pasar;
2. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan pasar;
3. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
4. Melaksanakan inventarisasi kerusakan fasilitas pasar dan usulan perbaikan;
5. Menyusun laporan administrasi dan kegiatan di lingkungan Pasar;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar;

Kepala UPTD mempunyai Tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Perencanaan, pelaporan, umum dan kepegawaian UPTD.

r. Tugas kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Pasar disertai dengan keahlian dan kebutuhan

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 peraturan ini, terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar;
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penyajian Data Penelitian

1. Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan kebijakan yang dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan yang menggambarkan upaya yang sistematis dan terarah menuju tercapainya Visi dan Misi diatas. Maka telah ditetapkan

Kebijakan yang dituangkan kedalam bentuk Program dan kegiatan, sebagai SKPD yang bertugas menyediakan pelayanan pasar, Dinas pasar mendapatkan amanah dalam menggali pendapatan Retribusi pasar. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Upaya meningkatkan sumber daya aparatur merupakan fungsi yang cukup penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pendapatan daerah. Dalam prakteknya, peningkatan kualitas sumber daya aparatur ini diwujudkan dalam :

1. Peningkatan disiplin kerja aparat

Kedisiplinan aparat pengelola merupakan faktor penting dalam tercapainya tujuan dari instansi. Dengan adanya pola disiplin pegawai yang baik maka secara langsung dapat mendukung meningkatnya pendapatan daerah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.

Lebih lanjut menurut Dr. Hendi Listianingsih, M.si Selaku Ketua Bidang Pengembangan dan Penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“kedisiplinan merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian tujuan. Disiplin pegawai diterapkan dengan baik dan tegas disini. Mulai setiap hari dengan adanya apel yang dipimpin Bapak Kepala Dinas serta pengecekan absensi. Selain itu para Kabid juga punya tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan disiplin kerja para staff”. (wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00)

Pola kedisiplinan yang diterapkan pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sesuai aturan yang ada. Mulai dari apel pagi yang diikuti semua pegawai untuk melatih kedisiplinan dasar bagi pegawai. Karena kondisi kantor yang cukup besar sehingga tidak mungkin Kepala Dinas mengecek kedisiplinan pegawai, disini tugas para Kabid untuk mengawasi dan menegakkan disiplin pegawai.

Senada dengan penjelasan diatas, Ibu Lik Ana.SE selaku staff pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan disiplin aparat dinas pasar selalu menerapkan aturan yang berlaku jika dilanggar akan mendapatkan sanksi atau *punishment* mas. Pertama akan diberi teguran, kedua akan diberi surat peringatan atau panggilan dan terakhir sanksi yang paling berat adalah surat pemberhentian mas”. (wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00)

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa dinas pasar Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan sistem *punishment* tetapi sepenuhnya belum berjalan dengan lancar dan baik karena kurangnya kesadaran pegawai dalam meningkatkan kedisiplinan kerja aparat.

2. Peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai

Peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai merupakan salah satu aspek penunjang dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. Upaya yang dilakukan dinas pasar kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai

disesuaikan dengan posisi serta tugas-tugas yang diemban pegawai bersangkutan, upaya tersebut secara terus-menerus dilakukan secara intern maupun dengan mengikuti pelatihan diluar seperti penataran, diklat yang dilaksanakan pemerintah Kota Sidoarjo maupun pemerinta Propinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Hendi Listianingsih, M.si Selaku Ketua Bidang Pengembangan dan Penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“ Salah satu upaya meningkatkan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai yaitu dengan meningkatkan kualitas pegawai. Dinas pasar secara berkala melakukan workshop dan seminar, workshop pun juga dilakukan dari pemerintah daerah juga ada undangan dari pemerintah Propinsi untuk melakukan kegiatan pelatihan”. (wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00)

Seperti halnya dinas lain, pola peningkatan kualitas pegawai juga ditingkatkan dalam tubuh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sehubungan dengan tugas dan fungsi dinas sendiri yang memerlukan kualitas sumber daya aparatur yang baik. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur antara lain dengan workshop, diklat dan training yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas aparatur yang baik pula.

b. Meningkatkan Pendapatan Pasar

Peningkatan mutu pelayanan amatlah penting posisinya dalam Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat. Dengan adanya

pelayanan yang baik maka menciptakan lingkungan pasar yang kondusif. Sehingga dapat menambah pendapatan pasar dan menambah rasa kepercayaan serta kesadaran masyarakat akan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Berikut ini tabel 1 adalah struktur tarif retribusi pelayanan pasar Kabupaten Sidoarjo:

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	TEMPAT	URAIAN	PASAR KELAS I Lt. bawah/atas Rp/m ² /kendaraan/orang	PASAR KELAS II Lt. bawah/atas Rp/m ² /kendaraan/orang
1	2	3	4	5
A	BIAYA PEMAKAIAN BANGUNAN TOGU/RUKO, KIOS, DAN LOS			
	1. Biaya Pemakaian Bangunan (Togu/Ruko, Kios, Los)	Pemakaian Bangunan/ 3 (tiga) tahun a. Togu/Ruko b. Kios c. Los	1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00	1.250.000,00 750.000,00 400.000,00
	2. Biaya Pemakaian kembali Bangunan (Togu/Ruko, Kios, Los)	Pemakaian kembali Bangunan (daftar ulang)/3 (tiga) tahun a. Togu/Ruko b. Kios c. Los	90.000,00 80.000,00 60.000,00	80.000,00 70.000,00 50.000,00
	3. Biaya Mengubah Bentuk atau Fungsi Bangunan	Perubahan Bentuk atau Fungsi Bangunan a. Togu/Ruko b. Kios c. Los	1.100.000,00 600.000,00 400.000,00	1.000.000,00 500.000,00 300.000,00
	4. Biaya Balik Nama Atas Pemindahtangannan Pemakaian Bangunan	Pemindahtangannan Pemakaian Bangunan a. Togu/Ruko b. Kios c. Los	650.000,00 550.000,00 350.000,00	550.000,00 450.000,00 300.000,00
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA FASILITAS PASAR/HARI			
B	Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya	1. Membongkar atau memuat barang dagangan dengan menggunakan kendaraan a. Truk b. Pick Up/Mini Bus dan sejenisnya c. Dokar d. Becak/Motor Roda 3 2. Kamar Mandi/WC/Toilet a. Mandi/Hajad Besar	4.000,00 3.000,00 500,00 500,00 1.500,00	3.000,00 2.000,00 250,00 250,00 1.000,00

	b. Hajad Kecil	1.000,00	500,00
	3. Penjualan ayam dan seterusnya		
	a. Lesehan, ecaran, perekor	500,00	300,00
	b. Menggunakan sepeda	1.000,00	500,00
	4. Penjualan Burung		
	a. Memakai Sepeda, Persepeda	500,00	350,00
	b. Memakai Sepeda Motor	500,00	250,00
	5. Penjualan Ternak		
	a. Lembu, kerbau, kuda perekor	2.500,00	1.500,00
	b. Kambing, domba perekor	2.000,00 5.000,00	1.000,00 3.000,00
	c. Babi perekor		
	6. Penjualan dengan memakai mobil keliling, pembeli	3.000,00	2.500,00
	7. Penjualan dengan memakai sepeda persepeda	1.000,00	500,00
	a. Jual beras	1.000,00	500,00
	b. Jual sayuran	1.000,00	500,00
	c. Jual ketela pohon, ketela rambat, dan jenis ubi lainnya	500,00	750,00
C	8. Pedagang sepeda		
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DENGAN CARA LESEHAN ATAU PANCAAN (PELATARAN)/HARI		300,00
D	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT KIOS/HARI		350,00

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Lebih lanjut lagi Dr. Hendi Listianingsih, M.si selaku ketua bidang pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo menjelaskan tentang strategi yang diambil Dinas Pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut :

“Dalam kaitanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, segenap jajaran pegawai telah mencanangkan beberapa cara diantaranya merupakan startegi rutin yang telah dilaksanakan seperti pola intensifikasi. Dan selalu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut.” (wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00)

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan benar-benar dioptimalkan. Selain itu peningkatan mutu pelayanan juga difokuskan pada pelatihan sumber daya aparatur serta peremajaan sarana prasarana yang ada guna memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Lebih lanjut tentang perbaikan aspek kelembagaan dijelaskan Ibu Lik Ana.SE selaku staff pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Perbaikan aspek kelembagaan ini kaitannya dengan fungsi dinas itu sendiri. Dalam menjalankan tugas, dinas dibagi dalam beberapa bidang sehingga memudahkan dalam proses kerja. Dalam tiap bidang juga dikepalai oleh seorang Kabid yang fungsinya sebagai kordinator antara staff dan juga Kepala Dinas secara langsung. Bidang-bidang yang cukup sentral dalam dinas ini menurut saya ada Bidang Pengembangan dan Penerimaan yang didalamnya ada seksi pengembangan dan seksi penagihan serta pembukuan selain itu ada Bidang Keamanan, Ketertibaan dan Kebersihan Pasar serta Bidang Pemeliharaan tetapi secara keseluruhan semua bidang penting koordinasinya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dinas” (wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penataan fungsi tiap bidang sangat penting guna memfokuskan terhadap tugas yang ada serta pembagian tugas bagi setiap aparat. Selain itu dengan penataan fungsi akan mendukung terciptanya koordinasi antar bidang dengan jelas sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan sebagai berikut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat yang akan dilampirkan ditabel 2 sebagai berikut mulai tahun 2008 sampai 2012:

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2008 S.D 2012**

	2008	2009	2010	2011	2012
PENDAPATAN DAERAH	1.181.599.984.672,37	1.408.999.721.588,09	1.674.833.481.145,32	2.005.191.397.714,27	2.317.444.096.038,41
Pendapaan Asli Daerah	213.693.758.966,37	284.660.711.556,09	356.161.848.548,24	484.313.737.307,27	699.617.556.904,41
Hasil Pajak Daerah	111.960.199.960,00	123.268.123.919,77	1.718.409.622,00	264.538.593.736,65	400.366.973.028,30
Pajak Hotel	864.117.024,00	1.109.496.925,00	10.388.681.059,00	2.491.436.387,00	3.142.294.256,00
Pajak Restoran	6.404.461.459,00	8.332.720.550,00	524.856.402,00	17.372.469.326,00	21.943.947.401,00
Pajak Hiburan	290.414.290,00	140.775.355,00	7.172.894.141,00	921.709.523,00	1.295.979.367,00
Pajak Reklame	4.644.824.607,00	4.976.239.307,00	120.672.991.713,16	8.627.271.694,00	8.582.371.415,00
Pajak Penerangan Jalan	97.107.056.780,00	105.595.380.482,77	3.437.625.200,00	136.470.047.676,95	144.400.701.976,30
Pajak Parkir	2.649.325.800,00	3.113.511.300,00	-	6.225.476.600,00	9.126.486.720,00
Pajak Air Tanah	-	-	-	1.000.836.659,00	1.409.757.972,00
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	111.326.978.118,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	91.429.345.870,70	99.138.455.803,00
Hasil Retribusi Daerah	77.450.960.010,00	43.491.131.245,00	62.550.632.684,97	72.700.186.148,00	84.410.433.303,45
Retribusi Jasa Umum	58.639.711.145,00	15.753.864.405,00	18.048.448.385,47	18.009.738.210,00	22.432.786.293,00
Retribusi Jasa Usaha	7.503.652.821,00	14.993.324.170,00	22.182.540.450,00	24.670.399.040,00	27.041.667.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	11.307.590.044,00	12.743.942.670,00	22.319.643.849,50	30.020.048.898,00	34.935.979.510,45

Sumber: Dokumen Data Keuangan Kabupaten Sidoarjo

Dalam peraturan daerah yang ada secara umum penyesuaian tarif pajak dan retribusi sudah ditetapkan. Penyesuaianpun tergantung pada dinamika sosial serta kebijakan yang diambil pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah yang ada. Berkaitan dengan hal

tersebut Bapak Nawari selaku kasi pengembangan Dinas Pasar kabupaten Sidoarjo menjelaskan sebagai berikut :

“penyesuaian tarif pajak ditetapkan dengan melihat dinamika sosial dan iklim pasar yang ada, sebagai contoh untuk penarikan retribusi harian kios dengan pedagang tikar dikenakan tarif yang berbeda dikarenakan fasilitas yang didapatkan berbeda yaitu pedagang kios mendapatkan tempat tersendiri (stan) sedangkan pedagang tikar hanya berdagang di pinggir jalan dengan menggelar dagangannya menggunakan tikar. Penyesuaian tarif telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. (wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat usaha penyesuaian tarif yang dilakukan Dinas Pasar kabupaten Sidoarjo. Penyesuaian tarif yang ada harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada sehingga tidak bertentangan dengan keduanya dan berkorelasi secara baik dengan masyarakat.

c. Meningkatkan Kapasitas Stan

Berdasarkan tabel 3 jumlah Pasar Tradisional Kabupaten Sidoarjo ada 17 Pasar dan 5 UPTD :

I. UPTD Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit larangan 2. Unit loak dan unggas 3. Unit buduran
II. UPTD Krian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit krian 2. Unit prambon 3. Unit wonoayu 4. Unit watutulis 5. Unit tarik
III. UPTD Porong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit porong 2. Unit tulangan 3. Unit krembung 4. Unit bulang
IV. UPTD Wadungsari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit wadungsari 2. Unit gedangan

	3. Unit waru atau kedungrejo
V. UPTD Taman	1. Unit Taman 2. Unit sukodono

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Lebih lanjut lagi dijelaskan dijelaskan Ibu Lik Ana.SE selaku staff pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sidoarjo mencapai 17 unit pasar yang terbagi dalam 5 UPTD yaitu UPTD Sidoarjo (unit Larangan, unit Loak dan Unggas dan unit Buduran), UPTD Krian (unit Krian, unit Prambon, unit Wonoayu, unit Watutulis, unit Tarik), UPTD Porong (unit Porong, unit Tulangan, unit Krembung, unit Bulang), UPTD Wadungsari (unit Wadungsari, unit Gedangan, unit Waru atau Kedungrejo), dan UPTD Taman (unit Taman dan unit Sukodono)”.(wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 11.00).

Jumlah Stan (Los dan Kios) target dalam RPJMD Tahun 2013 adalah 13.723 unit sedangkan realisasi yang dicapai sebanyak 13.881 Unit, dapat dicapai 101.10%. Tabel 4 Jumlah Stan (Los dan Kios) :

Jumlah Stan Tahun 2012-2013

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2012		Tahun 2013		Capaian Kinerja Thn 2013 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Stand (Los/Kios) yang ada	Tahun	14.256	13.855	13.723	13.881	101.10%

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stan (los atau kios) yang terealisasi jumlahnya dari tahun 2012 sejumlah 13.855, sedangkan realisasi yang bisa dicapai tahun 2013 sejumlah 13.881 los atau kios, sehingga jumlah yang bisa direalisasikan sebesar 101,10 persen, naik dari data realisasi tahun 2012.

d. Meningkatkan Fasilitas Penunjang

Pembeli pasar tradisional tidak hanya berasal dari dalam kota tetapi juga terdapat pembeli dari luar kota. Fasilitas penunjang sangatlah penting terutama sarana prasarana yang menunjang dalam kegiatan di dalam pasar. Seperti yang akan dijelaskan oleh Pak Nawari tentang sarana dan prasarana sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana ada dua yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Pertama barang bergerak seperti mobil dinas, truk sampah dan gerobak sampah kalau barang tidak bergerak seperti luas pasar, bangunan pasar dan objek yang ada di unit-unit pasar”.
(wawancara pada tanggal 11 April 2014 pukul 11.00)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan sarana dan prasarana sangatlah penting dalam kegiatan didalam pasar. Sarana dan prasarana diperuntukkan untuk memperlancar atau mempermudah kegiatan yang ada di pasar. Selanjutnya akan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Nawari tentang fasilitas penunjang.

Dengan adanya fasilitas penunjang seperti tempat parkir akan memberikan nilai lebih dalam sektor keamanan dan kenyamanan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Nawari sebagai berikut :

“Fasilitas penunjang seperti adanya tukang parkir itu masuk dalam kearifan lokal mas. Maksudnya itu sebagaimana tempat parkir dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai kompensasi dari pembangunan pasar ini mas. Dan sebagaimana lagi dikelola oleh dinas mas yang nantinya masuk dalam retribusi parkir seperti parkir berlangganan. Belum lagi masalah parkir liar mas yang membuat semrawut dan macet karena dipinggir jalan mas dan gak tahu uangnya lari kemana ”(wawancara pada tanggal 11 April 2014 pukul 11.00)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas penunjang seperti parkir belum sepenuhnya baik seperti manajemen parkir yang berada pada pasar modern atau mall yang mempunyai sistem. Tetapi dinas pasar sendiri sudah menyediakan fasilitas parkir berlangganan yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkunjung di pasar tradisional.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan

Dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo pasti mengalami hambatan dan pendukung yang beragam. Berikut dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam mencapai penerimaan daerah yang optimal.

a. Faktor Pendukung

1. Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Pelibatan masyarakat merupakan salah satu poin utama dalam keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan pun

tidak bisa lepas dari peran masyarakat baik dalam ketertiban membayar pajak maupun menyumbangkan pendapat dalam rangka pembangunan. Pembangunan yang berhasil sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang diterima langsung dari masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Nawari selaku kasi pengembangan Dinas Pasar kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangatlah penting posisinya mas. Dalam hal ini wadah yang biasanya digunakan adalah musrembang dimana dalam wadah ini semua aspirasi masyarakat tentang pembangunan di Sidoarjo bisa ditampung yang nantinya bisa direalisasikan bersama-sama.” (wawancara pada tanggal 30 April pukul 11.00)

Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) guna memberikan masukan bagi pemerintah daerah gambaran pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan Ibu Lik Ana.SE selaku staff pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“dalam perencanaan pembangunan bisa juga disampaikan tentang informasi pajak dan retribusi mas, dimana pajak dan retribusi penting fungsinya dalam pembangunan di daerah Sidoarjo sehingga masyarakat pasar dan masyarakat sekitar harus tahu pentingnya membayar pajak dan retribusi tersebut mas”. (wawancara pada tanggal 30 April pukul 11.00)

Dengan adanya pelibatan itu mendukung proses perumusan kebijakan secara *bottom-up* agar jelas apa yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan juga disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah maka dari itu disini juga dituntut peran masyarakat agar menyadari kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

2. Mengoptimalkan Potensi Pasar yang Ada

Pengoptimalan potensi pasar sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kondisi sosial lingkungan yang ada. Perbedaan tingkat ekonomi dan kondisi geografis tiap daerah yang berbeda-beda turut menentukan penerimaan daerah. Untuk kota Sidoarjo kondisi ekonomi saat ini sedang meningkat dengan siklus investasi yang semakin tinggi membuat sektor pendapatan daerah meningkat secara langsung.

Selain itu kondisi geografis dan letak wilayah Kota Sidoarjo yang strategis karena berdekatan dengan Kota Surabaya yang merupakan kota besar yang menyebabkan para investor tertarik untuk menanamkan modal dan membangun iklim ekonomi yang baik. Dengan kondisi demikian sangat mungkin untuk mengembangkan potensi yang dapat memberikan hasil yang signifikan bagi penerimaan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Nawari selaku kasi pengembangan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“masuknya investor membuat iklim perekonomian semakin meningkat. Hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya potensi pendapatan. Dengan adanya pergerakan ekonomi dapat semakin meningkatkan potensi pajak retribusi pada Dinas Pasar.” (wawancara pada tanggal 30 April pukul 11.00)

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi pendapatan yang beragam. Disini menjadi tantangan bagi Dinas Pasar dalam mengelola pasar tradisional untuk mengembangkan potensi yang ada, selain itu peran swasta dalam membangun iklim ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga menjadi penting posisinya sebagai penunjang bagi meningkatnya perekonomian karena dengan meningkatnya perekonomian maka akan berbanding lurus dengan tingkat pendapan asli daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran Pedagang Dalam Membayar Pajak Retribusi

Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar pajak retribusi dikarenakan kurangnya kepedulian pedagang akan pentingnya membayar pajak retribusi pasar. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Nawari sebagai berikut :

“Untuk meminta pedagang membayar pajak retribusi itu gampang-gampang sulit mas. Dikarenakan ada banyak pedagang yang nakal dan tidak mau membayar, terkadang hanya membayar separuh dari pajak yang ditentukan mas. Itu disebabkan karena pedagang merasa pasar pada hari itu sepi dan dagangannya banyak yang tidak laku. Nah dari situ pedagang enggan membayar pajak retribusi mas dikarenakan pemasukan pada hari itu sedikit mas katanya dan tidak mendapatkan untung lebih”. (wawancara pada tanggal 30 April pukul 11.00)

Pedagang diharapkan mempunyai kesadaran membayar kewajiban pajak retribusi. Tetapi dalam prakteknya di lapangan

tentunya masih ada pedagang yang belum menyadari hal tersebut. kesadaran para pedagang mengenai pentingnya membayar pajak masih sangat minim sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak karena pajak digunakan sebagai penunjang pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

2. Kurangnya Pemahaman Pedagang Dalam Menjaga Fasilitas Yang Ada Di Dalam Pasar.

Pemahaman yang sangat minim pada pedagang mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai pentingnya menjaga lingkungan pasar. Dengan adanya lingkungan pasar yang bersih dan rapi secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah pengunjung yang juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, hal ini akan berdampak positif dengan meningkatnya pendapatan para pedagang. Seperti yang akan dijelaskan Ibu Lik Ana.SE selaku staff pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan pemahaman para pedagang dalam menjaga fasilitas pasar, pemerintah mengadakan workshop secara rutin guna meningkatkan pemahaman pedagang agar pedagang semakin mengerti bahwa dengan terjaganya lingkungan pasar akan meningkatkan pendapatan para pedagang” (wawancara pada tanggal 30 April pukul 11.00)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya sumber daya aparatur saja yang diperlukan tetapi juga sumber daya manusia yaitu para pedagang agar para pedagang mengerti bahwa

dengan terjaganya lingkungan pasar itu akan berdampak baik kepada semuanya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Nawari selaku kasi pengembangan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“ Seperti fasilitas stan yang sudah disediakan oleh dinas pasar mas seolah-olah tidak terawat dan terjaga kebersihan bagunannya. Cat dinding bangunan terlihat kotor dan kusam, serta ada selokan yang tersumbat dibiarkan saja sehingga membuat pasar becek dan bau yang tidak enak mas”. (wawancara pada tanggal 30 April pukul 11.00)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar sangat memperhatikan dan perlu perawatan dan perhatian yang cukup jadi para pedagang harus paham dalam menjaga lingkungan pasar, hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada para pedagang.

D. Analisis Data

1. Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan.

a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam peningkatan kualitas aparat, Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo memfokuskan pada cara peningkatan aparat yaitu:

1. Peningkatan disiplin kerja aparat

Disiplin kerja aparat pemerintah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sangat penting guna mewujudkan visi dan misi yang sudah dicanangkan. Bukan hanya sistem dan aspek

kelembagaan saja yang dibutuh ditingkatkan, justru aparat pun harus ditingkatkan disiplin kerjanya.

Disiplin kerja aparat menurut data wawancara dimulai setiap hari dengan adanya apel pagi dan juga sistem absensi kerja. Apabila ada yang melanggar, Kepala Dinas akan memberikan teguran bahkan hukuman pada individu. Menurut data penerapan disiplin kerja tidak sepenuhnya berada pada tanggungjawab Kepala Dinas sebagai pemimpin instansi tapi lebih pada setiap individu aparat untuk lebih mempunyai rasa disiplin pada pekerjaannya. Selain itu Kabid pun memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dan disiplin dari staff karena kabid yang bisa melihat secara langsung kinerja mereka.

Pola disiplin kerja disini berkaitan dengan etos kerja yang dimiliki aparat. Etos kerja aparat selalu berbeda antara satu dengan yang lain, disini merupakan tugas segenap aparat untuk meningkatkan etos kerja dimana sebagai pegawai negeri harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang sudah diamanatkan. Harus adanya tindakan konkrit untuk merubah pemikiran masyarakat bahwa pegawai negeri dinas hanya bekerja sesuai dengan kegiatan yang ada yaitu dengan meningkatkan etos kerja serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar masyarakat sendiri memahami tugas dari Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.

2. Peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan pegawai

Peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan pegawai atau aparat pun menjadi fokus dalam upaya pengoptimalan penerimaan daerah. Peningkatan ketrampilan dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, diklat, pembinaan teknologi, maupun seminar. Kegiatan pun tidak semata dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetapi juga berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengadakan *workshop*.

Suatu ketrampilan dan pengetahuan yang meningkat juga sangat penting karena bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang tiap hari terjadi. Suatu aparat yang terampil akan bisa mengatasi permasalahan dengan cepat. Dengan hal tersebut maka sistem kerja akan berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu pengetahuan dan ketrampilan yang baik akan dengan mudah menyerap ilmu dengan cepat dalam kaitan ini dalam upaya peningkatan sistem informasi jika aparat memiliki ketrampilan yang baik serta pengetahuan yang luas maka pemahaman terhadap sistem informasi yang baru akan cepat diserap pegawai.

b. Meningkatkan Pendapatan Pasar

Strategi yang diambil Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah melalui program

intensifikasi. Program intensifikasi yang pertama dengan melakukan perbaikan aspek kelembagaan. Dengan perbaikan kelembagaan ini maka diharapkan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo menjadi lembaga yang baik., sebab dengan adanya lembaga yang baik tersebut maka program peningkatan PAD dapat diwujudkan.

Menurut data wawancara Dr. Hendi Listianingsih, M.si selaku ketua bidang pengembangan dan penagihan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa dinas ini terus berbenah dalam segi kelembagaan dimana lembaga ini telah berorientasi pada fungsi-fungsi organisasi yang tepat sesuai tupoksinya. Selain itu juga mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan orientasi yang sudah terstruktur dalam fungsi masing-masing diharapkan dapat mewujudkan pola penerimaan daerah yang optimal dan tentu harus ada hubungan yang baik antar berbagai bidang atau unit kerja. Dapat dilihat dari tabel 3 sebelumnya mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Strategi penyesuaian tarif di Kabupaten Sidoarjo menurut data wawancara oleh Bapak Nawari selaku kasi pengembangan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang berubah-ubah serta kondisi sosial yang semakin maju karena pengaruh globalisasi. Sebagai contoh dengan berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat maka tarif yang dikenakan untuk pajak-pajak

tertentu juga berubah. Selain itu penyesuaian tarif yang diambil juga didukung dengan adanya undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan pajak yang diterapkan.

Akan tetapi pola penyesuaian tarif pajak harus dirancang dan diambil sebijak mungkin agar dapat diterima baik oleh masyarakat dan tidak malah memberatkan masyarakat. Disini penting sekali adanya sosialisasi pada wajib pajak dan wajib retribusi untuk mengetahui tarif pajak yang bisa berubah secara dinamis.

c. Meningkatkan Kapasitas Stan

Sama seperti meningkatkan pendapatan pasar, meningkatkan kapasitas Stan juga penting untuk menunjang program dari Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Meningkatkan kapasitas stan atau menambah stan yang ada merupakan salah satu cara untuk menampung para pedagang yang semakin banyak. Dengan meningkatkan kapasitas stan yang ada secara langsung akan memudahkan dan memberi kenyamanan pada pedagang dalam kaitannya untuk berjualan dagangannya. Pedagang merasa nyaman dan lebih tertata tempat berjualannya. Selain itu pembayaran pajak retribusi menjadi lebih mudah hal ini dimaksudkan agar pendapatan dari sektor retribusi pasar dapat terserap secara optimal.

Selain itu dilihat dari tabel yang didapat pada saat wawancara dari tahun 2012 target pasar 14.256 stan tetapi target ini tidak terpenuhi

karena hanya terealisasi 13.855 stan yang ada. Sedangkan pada tahun 2013 Dinas Pasar menurunkan targetnya menjadi 13.723 stan dan realisasinya 13.881 stan. Ini menjadikan target pada tahun 2013 meningkat atau terpenuhi, sehingga jumlah yang bisa direalisasikan sebesar 101,10 persen, naik dari data realisasi tahun 2012. Sebagai berikut ini merupakan Sasaran Jumlah Stan yang buka di tabel 5:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2012		Tahun 2013		Capaian Kinerja Thn 2013 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Stan (Los/Kios) yang buka	%	14.256	9.322	13.723	9.436	68.76%

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pedagang yang buka tahun 2012 sebanyak 9.322 unit, sedangkan tahun 2013 yang buka sebanyak 9.436 yang bisa direalisasikan sebesar 68.76%, hal ini disebabkan karena kemampuan pedagang untuk membuka kios/los meningkat sehingga yang tadinya tutup menjadi buka.

Secara umum Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015. Hingga akhir tahun 2013, Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian seluruh sasaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013, dengan menggunakan standar pencapaian berdasarkan skala ordinal, Tabel 6 capaian Kinerja dari Dinas pasar Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Tingkat keberhasilan
1	Jumlah Stan (Los dan Kios) Target dalam RPJMD Tahun 2012 adalah 14.256 dan tahun 2013 adalah 13.723 angka tersebut adalah jumlah stand dan tempat transaksi bongkar muat 2012 adalah 13.855, sedangkan tahun 2013 adalah 13.881 stand, sehingga terjadi kenaikan jumlah stand sebesar 26 stand transaksi bongkar muat. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan stand tempat transaksi bongkar muat di Pasar Porong.	Baik
2	Jumlah Stan (Los/Kios) Tahun 2013 adalah 13.881 dengan jumlah pedagang 9.436, dengan nilai capaian sebesar 67.98%. Jumlah pedagang yang tutup adalah sebanyak 4.549 dengan asumsi sebagian pedagang tersebut menempati tempat lesehan yang strategis.	Cukup

Sumber : Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

d. Meningkatkan Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan sarana dan prasarana yang harus ada dalam pasar tradisional. Dengan adanya fasilitas penunjang dapat memudahkan para pedagang dan konsumen dalam menjalankan aktivitasnya. Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Pak Nawari selaku kasi pengembangan, fasilitas penunjang seperti tempat parkir

memang belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya parkir liar dipinggir pasar. Hal ini menyebabkan ketidak tertiban dalam mengelola pasar tradisional disisi lain dinas pasar sudah menyediakan tempat parkir khusus untuk para pengunjung itu pun sudah menggunakan *stiker* berlanggan. Selain itu perlunya sosialisasi tentang pentingnya kebersihan, keamanan dan menjaga hubungan yang lebih intens secara timbal balik antara pedagang dan aparat pasar. Sehingga dapat memunculkan iklim yang kondusif di dalam pasar tradisional.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan

a. Faktor Pendukung

1. Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Masyarakat merupakan objek penting dalam pembangunan daerah. Dalam hal peningkatan penerimaan pendapatan daerah, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perlu dilakukan untuk mengetahui keinginan masyarakat dalam hal pembangunan. Sebaliknya, pembangunan memerlukan biaya yang juga berasal dari masyarakat, maka dari itu posisi Musrembang disini penting selain untuk mengetahui aspirasi

masyarakat juga bisa digunakan sebagai sarana sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah.

Menurut data wawancara dengan Bapak Nawari selaku kasi pengembangan menjelaskan peran musrembang sangat penting untuk mengetahui aspirasi dari masyarakat. Selain itu dengan wadah ini bisa juga dijadikan sebagai sarana sosialisasi tentang pajak dan retribusi. Dengan adanya wadah seperti ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa mengerti apa yang diinginkan masyarakatnya dan juga memudahkan dalam menata letak kota. Selain itu juga memperhatikan kondisi daerah dan rencana pembangunan yang hendak dicapai. Disini jelas memerlukan aspirasi masyarakat karena kembali lagi dalam suatu pembangunan tentunya memerlukan biaya yang jelas asalnya dari pembayaran pajak serta retribusi masyarakat.

2. Mengoptimalkan Potensi Pasar Yang Ada

Pada dasarnya semua sektor pendapatan melalui pajak di Kabupaten Sidoarjo bisa ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Nawari selaku kasi pengembangan bahwa seiring dengan iklim perekonomian yang semakin berkembang akan menunjang pula potensi pendapatan yang bisa diambil. Tingginya tingkat investasi dan potensi ekonomi yang dimiliki membuat investor berbondong-bondong masuk untuk membangun usaha. Dalam hal tersebut bisa

meningkatkan pendapatan pajak retribusi yang ada seperti retribusi parkir, retribusi stan, retribusi kebersihan pasar dan lain-lain.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo sebenarnya cukup besar. Meskipun memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas tetapi potensi ekonomi di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Hal ini terbukti dengan terus berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern yang membuat pasar tradisional harus tetap bersaing agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah. Karena dengan ramainya pengunjung yang berdatangan ke pasar tradisional secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran Pedagang Dalam Membayar Pajak Retribusi

Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi daerah merupakan salah satu faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Lemahnya disiplin pedagang terhadap membayar retribusi daerah membuat pendapatan daerah tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena para pedagang tidak tahu pentingnya membayar retribusi untuk pembangunan kedepannya.

Dengan adanya fenomena tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo untuk merubah pemikiran para pedagang dan memberikan pemahaman akan pentingnya retribusi daerah. Diharapkan pedagang berubah pemikiran bahwa pajak dan retribusi daerah nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

2. Kurangnya Pemahaman Pedagang Dalam Menjaga Fasilitas Yang Ada Di Dalam Pasar

Pemahaman yang sangat kurang terhadap menjaga fasilitas bersama yang telah disediakan di oleh dinas pasar. Pedagang menggunakan fasilitas itu dengan seenaknya sendiri dan tidak mau ikut menjaga dan merawat fasilitas yang sudah disediakan. Dengan adanya lingkungan yang bersih dan terawat akan menjadikan pasar tradisional itu nyaman dan indah dan tentunya akan menarik daya beli masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Nawari selaku kasi pengembangan Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga dan merawat dinas pasar Kabupaten Sidoarjo mengadakan *workshop* bersama pedagang, bukan hanya apart saja yang ikut *workshop* melainkan para pedandang juga ikut diajak dalam *workshop* tersebut. Diharapkan nantinya pedagang mau menjaga dan merawat fasilitas yang telah ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perdagangan pada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Perdagangan

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas aparat difokuskan pada peningkatan disiplin kerja dan peningkatan ketrampilan aparat. Bukan hal baru jika disiplin kerja pada setiap instansi pemerintahan tentu ada yang kendor. Dalam prakteknya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo menerapkan disiplin kerja yang cukup ketat. Pelanggaran disiplin kerja akan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan. Untuk peningkatan ketrampilan yaitu melakukan diklat, pelatihan kerja, bimbingan teknologi, workshop dan seminar.

b. Meningkatkan Pendapatan Pasar

Program intensifikasi yaitu dengan penetapan target penerimaan. Penetapan target fungsinya penting untuk memastikan potensi dan hasil yang bisa digali. Menurut data yang dipaparkan dalam pembahasan, target penerimaan pajak mulai tahun 2010 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

c. Meningkatkan Kapasitas Stan

Dilihat dari hasil pembahasan tahun 2012 target pasar 14.256 stan tetapi target ini tidak terpenuhi karena hanya terealisasi 13.855 stan yang ada. Sedangkan pada tahun 2013 Dinas Pasar menurunkan targetnya menjadi 13.723 stan dan realisasinya 13.881 stan. Ini menjadikan target pada tahun 2013 meningkat atau terpenuhi, sehingga jumlah yang bisa direalisasikan sebesar 101,10 persen, naik dari data realisasi tahun 2012.

d. Fasilitas Penunjang

Dilihat dari pembahasan fasilitas penunjang memang belum cukup memadai masih banyaknya fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung aktifitas berjalannya pasar tradisional. Salah satu contohnya adalah masih banyaknya parkir liar

dipinggir pasar. Hal ini menyebabkan ketidak tertiban dalam mengelola pasar tradisional.

2. faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pengembangan kapasitas pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah :

- a. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo tentunya terdapat faktor pendukung serta penghambat. Faktor pendukungnya antara lain yaitu pertama Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dengan adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai gambaran tentang keinginan masyarakat dalam hal pembangunan selain itu juga sebagai wadah bagi sosialisasi tentang fungsi, peran dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan. Kedua mengoptimalkan potensi pasar yang ada dan dikembangkan serta didukung dengan pertumbuhan ekonomiyang semakin meningkat diharapkan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

- b. Faktor Penghambat

Jika ada faktor pendukung pasti juga ada yang menghambat.

Faktor penghambat diantaranya pertama kurangnya

kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sehingga tidak bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan. Kedua kurangnya pemahaman pedagang dalam menjaga fasilitas yang ada di dalam pasar menjadikan fasilitas yang tersedia menjadi mudah rusak dan tidak terawat sehingga dapat menghambat proses berkembangnya pasar tradisional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, maka peneliti dapat memberikan saran serta masukan sebagai berikut :

1. Perlunya pemerajaan aparat yang lebih kompeten dirasa sangat perlu karena kurangnya aparat yang mempunyai daya kreatifitas tinggi. Serta masih banyaknya pegawai lama yang kurang kompeten membuat kuantitas lebih menonjol daripada kualitas. Disini memerlukan koordinasi antar pemangku pemerintah dalam sistem rekrutmen pegawai yang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk menjalankan tugas Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.
2. Adanya sistem *reward and punishment* yang jelas dan ketat. Instansi pemerintah sepertinya perlu mengadopsi sistem dari sektor swasta ini untuk meningkatkan kinerja yang optimal dari aparat. Dengan adanya sistem ini pegawai mempunyai semangat untuk bekerja secara optimal jika ingin mendapatkan *reward* dan akan menghindari *punishment* jika kerjanya tidak optimal. Hal ini dirasa

mampu dalam mendukung pengoptimalan penerimaan daerah terlebih dari sektor pendapatan asli daerah.

3. Mengintensifikan sistem pembayaran pajak dan retribusi online. Dunia online saat ini sedang berkembang dengan pesatnya. Menggunakan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online dengan bekerja sama dengan bank daerah atau bank swasta yang ada perlu ditingkatkan. Sistem ini lebih efisien bagi para wajib pajak atau wajib retribusi yang memiliki mobilitas tinggi.



Daftar Pustaka

- Afiffudin. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Penerbit :Alfabeta.
- Andriani, Maritf Nika dan Ali Mohammad Mukti.2013. *Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta*.<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2013 pukul 11.00 WIB
- Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Daryanto. (1997) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Penerbit Rosda Karya.
- Dryzek, John S. 1997. *The Politics of the Earth: Environmental Discourse*. New York: Oxford University Press.
- Gibbons, Michel T. 2002. *Tafsir Politik*. Yogyakarta: PT. Qalam.
- Halim, Abdul,2002, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hodder, Ian. 1994. *The Interpretation of Documents and Material Culture*. Dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2013, pukul 14.50
- Indrawijaya, A. Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011, *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Penerbit: Alfabeta.
- Jayadinata, J.T. 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. ITB: Bandung
- Kaho, Josef Riwu.2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Keban. Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. (2013). Kabupaten Sidoarjo.

Lubis, Irwansyah. 2009, *Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing*. Jakarta : Salemba Empat

Malano, Herman. 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia

Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Miles, M. B. and Huberman AM. 1984. *An Expenden Source Book, Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication

Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Morse and Field 1995. Morse JM, Field PA. *Qualitative Research Methods For Health Professionals*. Thousand Oaks, California: SAGE.

Pambudi, Linggar Agus. 2012. *Pengelolaan Pasar Demangan Yogyakarta*. E-Jurnal.uny.ac.id. Diakses pada tanggal 7 Desember 2013 pukul 11.10 WIB

Pamuji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

Paramita, Mirah Pradnya. 2013. *Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*. E-jurnal.ep.unud.ac.id. Diakses pada tanggal 7 Desember 2013 pukul 11.05 WIB

Rangkuti, 2007. Analisis SWOT. *Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Cetakan ke-12. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Riyadi. 2003. *Perencanaan pembangunan daerah : strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

R.D Jatmiko. 2003. *Manajemen Strategik*. Edisi Pertama, Penerbit UMM Press, Malang

Salusu M.A, Prof. Dr. J. 2002. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*. Jakarta : PT Grasindo

Sella, Farah Shinta. 2011. *Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Pemeliharaan Pasar Klewer*. digilib.UNS.ac.id Diakses pada tanggal 7 Desember 2013 pukul 11.15 WIB

Siagian, Sondang, 2005, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*, UM Press, Malang

Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar teori mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syaffie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya

Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta : Universitas Indonesia

Tjokroamidjojo, Bintaro dan Mustopadidjaja, 1984, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : Penerbit: PT Gunung Agung.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Nawari di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

Dialog Publik tentang Revitalisasi Pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo



Penertiban Parkir Liar di Pasar Larangan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar



Suasana Parkir Liar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

**SKPD DINAS PASAR
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2013**

- Visi** Menjadikan Pasar Tradisional Sebagai Pendorong Utama Kemandirian Dan Kesejahteraan Ekonomi
- Misi-1** Bersama Instansi terkait, menumbuh kembangkan potensi sektor perdagangan secara optimal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
- Tujuan** Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia satuan kerja

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN TARGET		REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1		2		3	4	5	6	7
1	Program 1 : Pembinaan Administrasi perkantoran							
1.1	Kegiatan 1 : Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Masukan	Rp.314.000.000,00	%	100%	306.654.501,00	97,66	
		Keluar	Belanja rekening telfon dan listrik					
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan Komunikasi dan Listrik					
1.2	Kegiatan 2: Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas / Operasional	Masukan	Rp.30.000.000,00	%	100%	15.670.500,00	52,24	
		Keluar	Terbayarnya PKB Operasional Dinas Truk sampah dan mobil OPS					
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan perizinan Kendaraan OPS 1 Thn					
1.3	Kegiatan 3 : Penyediaan jasa adm keuangan	Masukan	Rp.688.164.000,00	%	100%	655.206.000,00	95,21	
		Keluar	Honor Pengelola Keuangan					
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan jasa adm Keuangan 1 Thn					
1.4	Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan	Rp.40.000.000,00	%	100%	40.391.000,00	82,43	
		Keluar	Bahan Belanja Bahan Pembersih Honorarium Petugas Kebersihan					
		Hasil	Terpenuhinya jasa kebersihan Kantor 1 Thn					
1.5	Kegiatan 5 : Penyedia ATK	Masukan	Rp.45.522.900,00	%	100%	44.670.000,00	98,32	
		Keluar	Tersedianya ATK					
		Hasil	Kelancaran Operasional Kantor					
1.6	Kegiatan 6 : Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Masukan	Rp.35.725.000,00	%	100%	35.675.000,00	99,86	
		Keluar	Tersedianya barang cetakan dan Foto copy					
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan barang Cetakan selama 1 Thn					
1.7	Kegiatan 7 : Penyediaan barang bacaan dan peraturan per-UU	Masukan	7.000.000,00	%	100%	3.991.000,00	57,01	

		Keluar	Belanja surat kabar, dan bacaan, Buku Peraturan Per-UU 1 Thn					
		Hasil	Terpenuhinya belanja surat kabar, Dan bacaan buku peraturan Per-UU 1 thn					
1.8	Kegiatan 8 : Penyediaan barang Logistik dan Kantor	Masukan	Rp.161.400.000.00	%	100%	161.400.000.00	100.00	
		Keluar	Belanja BBM					
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan bahan Logistik 1 Thn					
1.9	Kegiatan 9 : Penyediaan makanan dan minuman	Masukan	Rp.7.500.000.00	Kotak/Du	100%	7.449.500.00	99,33	
		Keluar	Belanja makanan dan minuman rapat					
		Hasil	Terpenuhinya makanan dan minuman Rapat dalam 1 Thn					
1.10	Kegiatan 10 : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Masukan	Rp.210.000.000.00	Bulan	100%	204.756.500.00	97,50	
		Keluar	Belanja perjalanan dinas dalam dan Luar daerah					
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi Dan konsultasi keluar daerah 1 Thn					
2	Program 2 : Program peningkatan sarana dan orasarana Aparatur							
2.1	Kegiatan 1 : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Masukan	Rp.75.450.000.00	Bulan	100%	66.644.000.00	93,88	
		Keluar	Belanja perlengkapan bagian kantor					
		Hasil	Terpenuhinya perlengkapan gedung Kantor					
2.2	Kegiatan 2 : Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas/oprasional	Masukan	Rp.21.530.000.00	Bulan	100%	15.250.000.00	70,83	
		Keluar	Renovasi kamar mandi					
		Hasil	Terpenuhinya perbaikan kamar mandi					
2.3	Kegiatan 3 : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Masukan	Rp.396.387.175.00	Unit	100%	392.088.750.00	98,92	
		Keluar	Belanja jasa servis suku cadang Dan pelumas					
		Hasil	Kendaraan dinas/oprasional dalam Kondisi baik					
2.4	Kegiatan 4 : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Masukan	Rp.8.700.000.00	Unit	100%	8.525.000.00	92.00	
		Keluar	Pemeliharaan gedung kantor					
		Hasil	Gedung kantor dalam kondisi baik					
3	Program 3 : Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
3.1	Kegiatan 1 : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan	Masukan	Rp.41.484.000.00	Stel	100%	41.484.000.00	100.00	
		Keluar	Belanja pakaian dinas dan atributnya					
		Hasil	Terwujudnya disiplin aparatur					
4	Program 4 : program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur							

4.1	Kegiatan 1 : Pelatihan dan kursus ketrampilan formal	Masukan	Rp.133.650.000.00	Bulan	100%	114.015.000.00	85.31	
		Keluar	Bintek dan pengiriman kursus/pelatihan					
		Hasil	Meningkatkan Prosentase karyawan Yang memahami adm					
5	Program 5 : Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan							
5.1	Kegiatan 1 : Penyusunan laporan capaian laporan kinerja & realisasi SKPD	Masukan	Rp.13.284.000.00	Bulan	100%	10.210.000.00	77.07	
		Keluar	Dokumen rangkaian kerja dan Realisasi SKPD					
		Hasil	Terselesaikannya Laporan tepat waktu					
6	Program 6 : Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan							
6.1	Kegiatan 1: Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Masukan	Rp.1.002.300.00	Unit	90%	905.168.200.00	90.31	
		Keluar	Pengadaan sarana dan prasarana Kebersihan pasar					
		Hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana Pembuangan sampah					
6.2	Kegiatan 2: Peningkatan operasi dan pemeliharaan tuk sampah	Masukan	Rp.624.000.000.00	Unit	90%	624.000.000.00	100.00	
		Keluar	Pengadaan BBM truk sampah					
		Hasil	Terpenuhi operasional truk sampah					
6.3	Kegiatan 3: Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Masukan	Rp.85.939.800.00	Unit	90%	84.254.800.00	98.04	
		Keluar	Belanja ATK dan alat pemadam Kebakaran					
		Hasil	Terpenuhinya ATK dan alat pemadam Kebakaran					
6.4	Kegiatan 4: Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Masukan	Rp.20.481.000.00	Unit	90%	18.371.000.00	89.70	
		Keluar	Lomba kebersihan pasar					
		Hasil	Meningkatnya kepedulian terhadap Kebersihan dan tanggung jawab Dalam pelaksanaan tugas					
7	Program 7: peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah							
7.1	Kegiatan 1: penyusunan sistem informasi pengelolaan Keuangan daerah	Masukan	Rp.61.200.000.00	Bulan	85%	60.215.000.00	98.39	
		Keluar	Terbangunnya dat informasi Pendapatan pasar					
		Hasil	Terwujudnya data potensi dan Penerimaan pasar					
7.2	Kegiatan 2: Intensifikasi pendapatan daerah	Masukan	Rp.672.716.000.00	Bulan	100%	599.469.750.00	89.11	
		Keluar	Belaanja sarana penunjang peningkatan Pendapatan pasar					
		Hasil	Meningkatnya pendapatan pasar					
8	Program 8: Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan							

8.1	Kegiatan 1: Penyuluhan Peningkatan disiplin pedagang kaki lima Dan asongan	Masukan	Rp.25.450.000.00	Bulan/kali	100%	23.900.000.00	93.91	
		Keluar	Penyuluhan disiplin PKL					
		Hasil	Meningkatnya kesadaran PKL					
9	Program 9: Peningkatan Pasar							
9.1	Kegiatan 1: Pengembangan pengelolaan pasar daerah	Masukan	Rp.3.293.651.000.00	Unit	25%	3.189.446.00	96.84	
		Keluar	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar					
		Hasil	Meningkatnya kondisi pasar					



Curriculum Vitae

Nama : Andarta Oktavian
 NIM : 105030104111009
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Oktober 1991
 Email : andarta.oktavian@yahoo.com
 Nomer Telephone : 085645901236 ; 083856234831



Pendidikan Formal :

1. SDN Pucang 1 Sidoarjo (1998-2004)
2. SMP Negeri 1 Sidoarjo (2004-2007)
3. SMA Negeri 1 Sidoarjo (2007-2010)
4. Universitas Brawijaya Malang (2010-2014)

Pendidikan Non Formal :

1. DAT Professional Level
2. Preparation TOEIC
3. Magang di PNPM Mandiri Perkotaan Sidoarjo

Pengalaman Organisasi :

1. MAFIOSO (Master Fight Organization of Sport) (Manager Tenis Meja/Tenis lap 2010-2011)
2. MAFIOSO (Master Fight Organization of Sport) (Manager Tenis Meja/Tenis lap 2011-2012)
3. MAFIOSO (Master Fight Organization of Sport) (Ketua Divisi Humas 2012-2013)

Karya Ilmiah / Publikasi :

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan.
2. Pengembangan Kapasitas Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sektor Perdagangan.